# DETERMINASI EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI BALI

## SKRIPSI

Oleh:

Nama : Tri Wahyu Winarso
Nomor Mahasiswa : 14313447
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**Determinasi Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi**

**di Provinsi Bali**

# SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

oleh :


| | |
|---|---|
| Nama | : Tri Wahyu Winarso |
| Nomor Mahasiswa | : 14313447 |
| Program Studi | : Ilmu Ekonomi |


**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII.Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2017

Penulis,

Tri Wahyu Winarso

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Determinasi Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi

di Provinsi Bali

| | |
|---|---|
| Nama | : Tri Wahyu Winarso |
| Nomor Mahasiswa | : 14313447 |
| Program Studi | : Ilmu Ekonomi |

Yogyakarta, 10 November 2017

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

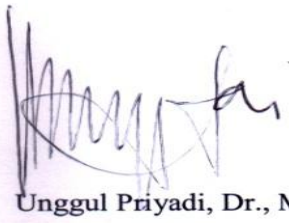

Unggul Priyadi, Dr., M,Si.



iv

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**DETERMINASI EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI BALI**

| | | |
|---|---|---|
| Disusun Oleh | : | **TRI WAHYU WINARSO** |
| Nomor Mahasiswa | : | **14313447** |

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 16 Januari 2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Penguji/ Pembimbing Skripsi | : | Unggul Priyadi, Dr., M.Si. | ..... |
| Penguji | : | Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc | ..... |

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”* (QS. Al-Insyirah,6-8)

*"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia"* (Nelson Mandela)

“*Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”* (Depag RI, 1989 : 421)

*“Aku tidak peduli akan keadaan susah dan senangku.Karena aku tidak tahu manakah diantara keduanya itu yang lebih baik bagiku”*. (Umar bin Khatab)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tiada henti yang selalu penulis panjatkan atas ridho, rahmat, dan hidayah-Nya, serta kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan harapan yang telah terpenuhi. Skripsi yang telah ditulis ini, penulis persembahkan untuk :

1. Terima kasih kepada Allah SWT.
2. Terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW.
3. Terima kasih kepada Kedua orang tuaku yang telah memberikan semangat, dukungan dan doanya.
4. Untuk Bapak Unggul Priyadi yang telah memberikan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang tidak henti-hentinya mendoakan anakmu hingga sejauh ini.
6. Terima kasih kepada kakak dan adekku atas doa yang kalian panjatkan.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang mendukung dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi Muhammad SAW. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: " Determinasi Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Bali", semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak lupa pula mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan yang dilimpahkan-Nya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Unggul Priyadi, Dr., M,Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah membimbing dan memberikan arahannya kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Ilmu-ilmu dan pengalaman yang Ibu berikan kepada penulis selama menempuh jenjang Strata 1 juga dijadikan penulis sebagai bekal untuk kedepannya. Terima kasih juga kepada Bapak yang dengan senang hati mendengarkan keluhan yang selama ini penulis curahkan.

3. Bapak, Ibu, dan kakak, adekku yang telah memberikan do'a serta dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Tugas Akhir ini.
4. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan Dedy, Rheza, Fiqi, Bima, Affan, Shadam, Sondang, Fachri Elfarabi, Haidar, Ifan Chezar,Ryan Dwi, Heri, Nico Surya Achadita yang telah berjuang bersama-sama dan sudah memberikan support.
5. Terimakasih untuk mbak Wilda Ramadhani yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan dukungan serta ilmunya yang sangat membantu dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu ekonomi angkatan 2014 yang telah banyak berbagi informasi dan selalu ada disaat menjalani susah dan senang yang telah seperti keluarga sendiri.
8. Terimakasih kepada Global Sun Star Pratama (GSP) Multimedia dan media partner event, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari pengalaman kerja dan telah menjadi sumber penghasilan saya selama kuliah

9. Terimakasih juga kepada Apro Production Event Organizer yang juga telah memberikan kesempatan bagi saya unutk memperoleh banyak pengalaman dalam dunia kerja dan juga memberikan kontribusi penghasilan bagi saya.
10. Dan akhirnya, semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya

Kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna.Namun kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi penulis dan masyarakat seluruhnya.

# DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **ii**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN UJIAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

Abstrak ..... **xvii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 9

1.3 Tujuan Penelitian ..... 9

1.4 Manfaat Penelitian ..... 9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 11**

2.2 Landasan Teori ..... 14

2.2.1 Pengertian dan Konsep Efisiensi ..... 14

2.2.2 Sektor Publik ..... 15

2.2.3 Efisiensi Sektor Publik ..... 16

2.2.4 Pembangunan Ekonomi ..... 17

2.2.5 Desentralisasi Fiskal ..... 19

2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto ..... 20

2.2.7 Pendapatan Daerah ..... 22

2.2.8 Pendapatan Asli Daerah ..... 23

2.2.9 Dana Perimbangan ..... 27

2.2.10 Lain - lain Pendapatan yang Sah ..... 32

2.2.11 Kemiskinan ..... 32

2.2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 34

2.3 Kerangka Pemikiran ..... 36

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 38**

3.1 Jenis dan Sumber Data ..... 38

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian ..... 38

A. Variabel input ..... 38

B. Variabel Output ..... 39

3.3 Metode Analisis Data Penelitian ..... 40

3.3.1 Konsep Dasar *Data Envelopment Analysis* (DEA) ..... 40

3.3.2 Formulasi DEA ..... 42

3.3.3 Kelebihan dan Kelemahan DEA ..... 44

**BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN ..... 45**

4.1 Gambaran Umum ..... 45

4.1.1 Pendapatan Regional ..... 45
4.1.2 Kemiskinan ..... 47
4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 48
4.1.4 Pendapatan Daerah ..... 49
4.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... 49
4.1.4.2 Dana Perimbangan ..... 51
4.1.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah ..... 54
4.2 Analisis Data dan Pembahasan ..... 55
**BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI ..... 65**
5.1 Simpulan ..... 65
5.2 Implikasi ..... 66
**DAFTAR PUSTAKA ..... 68**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..... 11

Tabel 2.2 Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28/2009 ..... 25

Tabel 4.1 PDRB Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali.....46

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tidak Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2015 (jiwa) ..... 47

Tabel 4.3 Tingkat Indeks Pebangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali..... 48

Tabel 4.4 PAD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali..... 50

Tabel 4.5 Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2015 (Rp) ..... 52

Tabel 4.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2015 (Rp) ..... 54

Tabel 4.7 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (persen %)..... 57

Tabel 4.8 Penggunaan Input yang Efisien pada Output yang Dihasilkan dan Pemborosan (Rupiah)..... 59

Tabel 4.9 Multiplier, Efisiensi dan Efficient Reference Set dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Tidak Efisien pada Tahun 2013-2015 ..... 61

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2011-2015 (Triliun Rupiah) ..... 4

Grafik 1.2 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015 (Triliun Rupiah) ..... 5

Grafik 1.3 Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)…… ..... ….7

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Variabel Input dan Variabel Output……..72

Lampiran II Hasil Olah Data Analisis Data Envelopment Analysis……74

Lampiran IV Evaluasi Penggunaan Variabel Input……..98

## Abstrak

Pendapatan daerah merupakan input dalam pembangunan ekonomi. Sektor tersebut yaitu meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi sektor publik yaitu pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain-pendapatan yang sah sebagai variabel input dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi yang dilihat dari PDRB, IPM ,dan jumlah penduduk yang tidak miskin sebagai variabel output indikator pembangunan ekonomi daerah.

Hasil dari penelitian ini terdapat tiga daerah di Provinsi Bali pada tahun 2013 dan 2014 yang mengalami inefisiensi yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Gianyar, sedangkan pada tahun 2015 terdapat lima daerah yang mengalami inefisiensi, bertambah dua daerah lain yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung yang tidak mencapai tingkat efisiensi relatif 100% selain tiga daerah yang sebelumnya telah mengalami inefisiensi dalam penggunaan input untuk menghasilkan output berdasarkan analisis menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).



*Kata kunci : Pendapatan daerah, Pembangunan Ekonomi, Efisiensi, Inefisiensi, Data Envelopment Analysis (DEA).*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainya pada tingkatan yang berbeda untuk menciptakan suatu inovasi dengan melakukan usaha serta saling ketergantungan dan keterkaitan dari segi aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan lainya sehingga peluang baru untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dapat diimplementasikan secara berkelanjutan guna untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses usaha dan tindakan nyata pemerintah daerah bersinergi dengan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).

Di Indonesia pemerintah telah mendominasi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dari proposional rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekitar 80% pendapatan negara telah dihasilkan oleh mekanisme sektor publik (PPA UGM, 2000). Sumber daya yang dimiliki oleh daerah hendaknya dapat diberdayakan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai pelayanan sektor publik yang lebih baik, dan tepat sasaran untuk masyarakat, dengan kata lain bahwa alokasi pengeluaran pemerintah dari berbagai sumber

daya yang dihasilkan oleh daerah harus dapat dimanfaatkan secara efisien, mengingat bahwa dari tahun ke tahun pengeluaran pemerintah untuk pembangunan terus meningkat dan akan terus meningkat (Chusna, 2014). Efisiensi merupakan kunci yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar dapat dikelola atau dialokasikan ke sektor-sektor tertentu dengan harapan dapat meningkatkan hasil yang baik dalam tahapan pembangunan suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah dapat tercapai jika hasil dari sumber daya yang ada dapat dioptimalkan dalam pengalokasianya dengan langkah strategis guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang optimal. Ketika kondisi tersebut tercapai, maka pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan telah mencapai tingkat yang efisien (Kurnia,2006).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak era reformasi yang memiliki tujuan utama yaitu mencapai pemerintahan yang efisien, yang mampu memberdayakan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, disamping itu sistem otonomi daerah bertujuan untuk agar pemerintah daerah dapat secara mandiri mengelola tatanan pemerintahanya termasuk juga dalam bidang pengelolaan keuangan, baik mengelola sumber pendapatan daerah maupun dalam pengeluaran pemerintah. Dasar hukum otonomi daerah antara lain adalah telah disahkanya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai perubahan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 dimaksudkan untuk

lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan menerapkan sistem desentralisasi, proses tata kelola pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran karena sistem desentralisasi telah diberi wewenang untuk menyelenggarakan program-program pembangunan, sehingga seluruh pertanggungjawaban, pengelolaan, dan pembiayaan dan pelayanan publik serta pengelolaan asset pemerintah lainya dapat dijalankan dengan lebih akurat dan juga optimal oleh pemerintah daerah desentralisasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi otoritas yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelanggaraan pemerintahan daerah, kemudian fungsi pengelolaan pengeluaran pemerintah dari sumber dana pendapatan daerah yaitu sebagai distribusi anggaran harus dirahkan agar dapat menuntaskan masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan serta problematika dalam proses pembangunan ekonomi daerah, serta dapat diarahkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah dengan

memberdayakan sumber daya yang ada di daerah untuk menghasilkan output yang optimal *(BPS,2016)*.

**Grafik 1.1 Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2011-2015 (Triliun Rupiah)**

*Sumber : BPS Bali, 2016*.

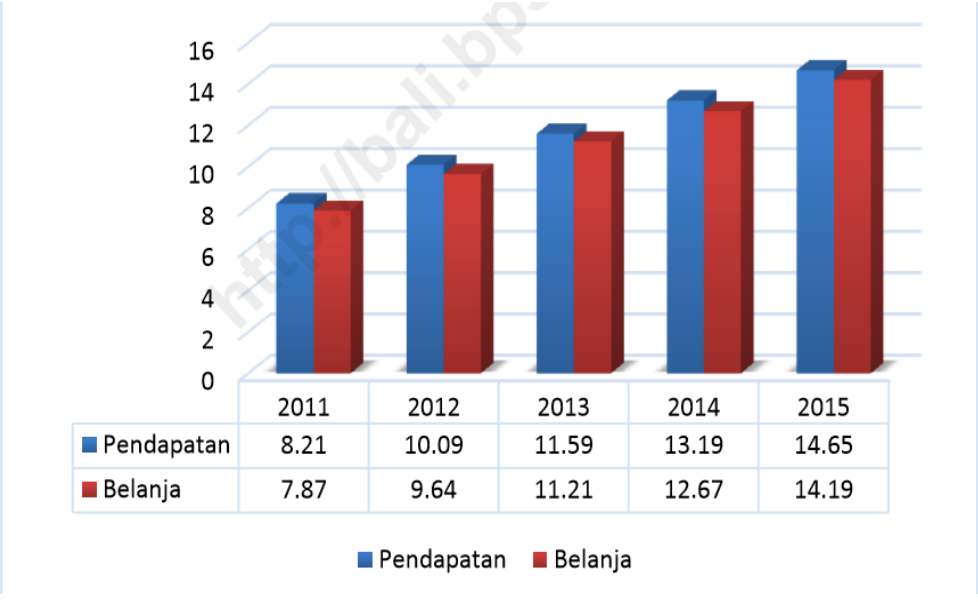


Pada ulasan keungan pemerintah provinsi Bali, sudah sejak dahulu Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki sektor pariwisata yang terunggul di Indonesia, berdasarkan data realisasi APBD tahun 2011 – 2015 per kabupaten/kota di Provinsi Bali telah dipaparkan bahwa adanya *trend* kenaikan baik itu dari sisi total pendapatan maupun belanja (gambar 1.1). Total pendapatan daerah 9 kabupaten/kota se-Provinsi Bali mencapai 8,21 triliun rupiah pada tahun 2011 yang kemudian menjadi 14,65 triliun rupiah pada tahun 2015, jika dipersentasekan pertumbuhannya mencapai 78,44 persen atau tumbuh rata – rata 19,61 persen per tahunnya. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali juga mengalami

kenaikan. Dalam rentang waktu 2011 – 2015, belanja daerah tumbuh 80,31 persen atau naik rata - rata 20,08 persen per tahun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan pemerintah selalu diiringi oleh peningkatan pengeluaran/belanja, dan hal ini terjadi berarti juga karena semakin besar pendapatan maka semakin besar juga alokasi dana pengeluaran untuk pembangunan daerah, serta semakin besar alokasi untuk pembangunan maka akan semakin besar pula capaian tujuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk masing-masing daerah kabupaten/kota di suatu provinsi memiliki pendpatan dan pengeluaran yang berbeda-beda, seperti pada gambar berikut :

**Grafik 1.2 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015 (Triliun Rupiah)**

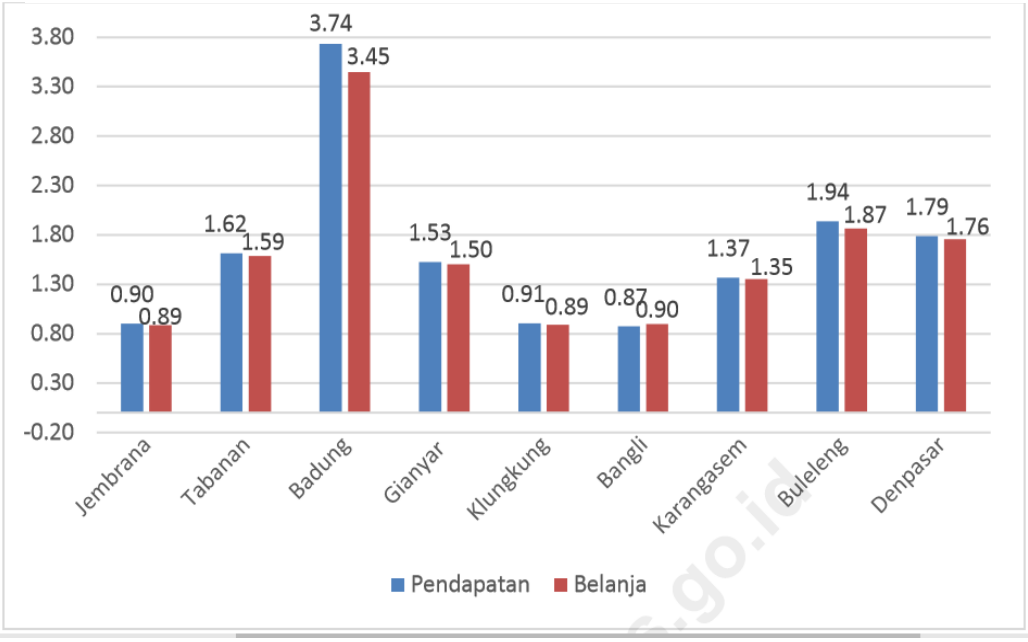


*Sumber : BPS Bali, 2016.*

Hasil data pada gambar grafik diatas meungkapkan bahwa realisasi pendapatan APBD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2015

(gambar1.2), menunjukkan bahwa Kabupaten Badung mempunyai pendapatan daerah yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung tercatat merealisasikan penerimaan APBD pada tahun 2015 mencapai 3,74 triliun rupiah dan melakukan belanja sebesar 3,45 triliun rupiah. Sedangkan Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar mencapai pendapatan APBD masing- masing sebesar 1,94 triliun rupiah dan 1,79 triliun rupiah serta melakuan belanja daerah masing-masing sebesar 1,87 triliun rupiah dan 1,76 triliun rupiah. Di sisi lain kabupaten yang tercatat memiliki capaian realisasi APBD tahun 2015 paling rendah tercatat di Kabupaten Bangli dengan nilai pendapatan sebesar 0,87 triliun rupiah dan belanja daerah 0,90 triliun rupiah, disusul oleh Kabupaten Klungkung dan Jembrana dengan capaian realiasasi pendapatan APBD tahun 2015 masing- masing sebeasar 0,91 triliun rupiah dan 0,90 triliun rupiah serta nilai belanja daerah masing-masing sebesar 0,89 triliun rupiah.

Capaian pendapatan masing-masing daerah kabupaten/kota tersebut bisa terjadi, tidak hanya pada daerah tersebut melainkan pada daerah kabupaten/kota di Indonesia lainya, hal ini bisa terjadi karena masing-masing daerah memiliki sumber pemasukan pendapatan dari sektor daerah masing-masing yang berbeda menurut potensialnya, serta faktor lain yaitu bagaimana sistem pengelolaan pendapatan daerah masing-masing oleh daerah untuk pengalokasianya untuk pengeluaran sebagai input untuk menghasilkan pembangunan ekonomi daerah.

**Grafik 1.3 Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)**

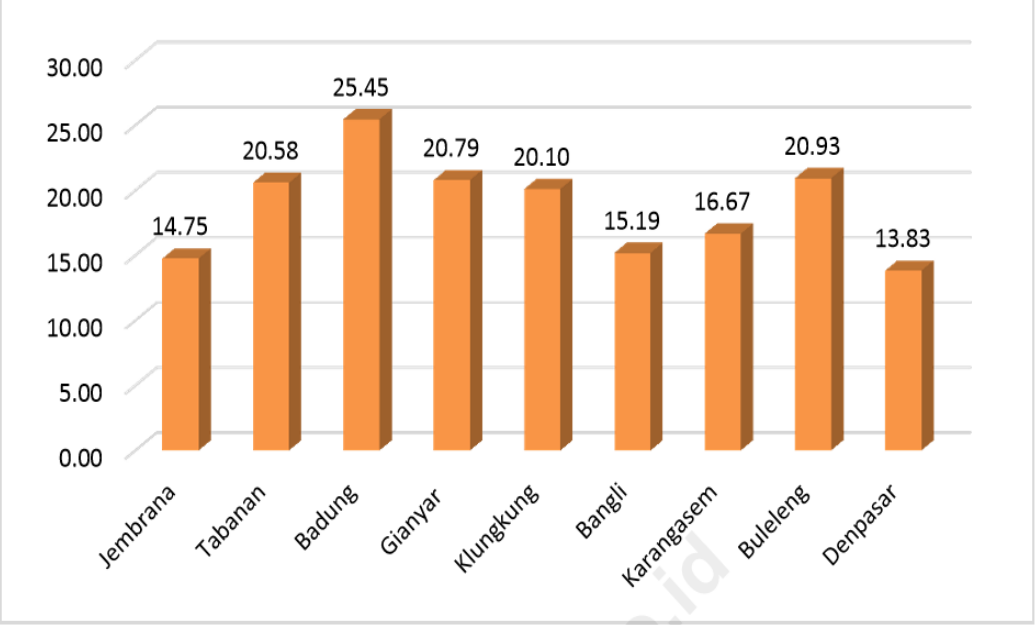


*Sumber : BPS Bali,2016*

Berdasarkan rata-rata Pertumbuhan pendapatan daerah di 9 kabupaten/kota se-Provinsi Bali pada periode 2011 – 2015, tercatat berada di atas 10 persen per tahunnya untuk seluruh kebupaten/kota (Gambar 1.3). Pendapatan daerah Kabupaten Badung tercatat mencapai rata – rata tertinggi di Provinsi Bali, yaitu 25,45 persen per tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Badung ini, kiranya tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pariwisata khususnya di wilayah Badung Selatan. Di sisi lain rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah terendah dalam lima tahun terakhir terjadi di Kota Denpasar yaitu sebesar 13,38 persen per tahun.

Kabupaten Badung merupakan daerah dengan APBD terbesar pada kenyataannya juga memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi. Sebaliknya Kabupaten Bangli dan Jembrana yang tercatat sebagai daerah dengan APBD yang rendah juga memiliki pertumbuhan yang rendah, dengan kisaran pertumbuhan dibawah 20 persen per tahun *(BPS Bali,2016).*

Data-data yang telah dirilis tersebut, menunjukkan bahwa Provinsi Bali yang merupakan daerah sektor pariwisata terbesar di Indonesia, memaparkan bahwa setiap daerah di kabupaten/kota di Bali tidak menunjukkan angka yang sama, bahkan relatif cukup besar selisih antar wilayah, hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki sektor dan produk-produk yang berbeda dalam menghasilkan pendapatan daerah untuk dialokasikan pada pembangunan ekonomi daerah, serta manajemen pengelolaan keuangan yang berbeda dari masing-masing daerah sehingga mengakibatkan tingkat efisiensi daerah dalam mengelola input (sumber daya) yang terdapat di masing-masing daerah untuk menghasilkan sebuah output yang optimal (pertumbuhan ekonomi) berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang membahas tentang pembangunan daerah, desentralisasi daerah, pertumbuhan ekonomi, efisiensi fiskal, dan peningkatan ekonomi, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **"Determinasi Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Bali".**

## 1.2 Rumusan Masalah

Penilitian ini menganalisis tingkat efiisiensi dari variabel input pendapatan daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), penduduk tidak miskin, dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel output pada Provinsi Bali.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi sektor publik terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini akan bermanfaat memberikan sumbangasih konseptual bagi perkembangan pada dunia ilmu ekonomi dan sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita pada dunia nyata.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

   Sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengukur efisiensi sektor publik dalam hal ini pendapatan daerah sebagai input terhadap peningkatan pembangunan ekonomi sebagai output, sejalan dengan itu maka, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang akan mendatang secara berkelanjutan.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori, konseptual yang ada untuk kemudian di membandingkan dalam implementasi di dunia nyata.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan referensi dan informasi bagi pembaca, khususnya dalam determinasi efisiensi.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran kinerja dan efisiensi terhadap sektor publik sangat perlu dilakukan sebagai langkah untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja sektor publik dalam usaha meningkatkan pembangunan daerah. Berbagai penelitian sudah dilakukan dalam pengukuran tingkat efisiensi kinerja sektor publik sebagai berikut:

**Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis dan judul penelitian | Metode Analisis dan Hasil Penelitian |
|---|---|---|
| 1. | Akhmad Syakir (2006), Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik (Studi Kasus Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2006). | Metode Free Disposable Hull (FDH), proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB nya tinggi tidak merepresentasikan bahwa angka yang tinggi, demikian pula dalam perhitungan efisiensi dengan Public Sektor Efficiency dan Free Disposable Hull, Kabupaten/Kota yang proporsi pengeluaran pemerintahan terhadap PDRB tidak terlalu relatif efisien, hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak terlalu relatif efisien, hal ini hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak berkorelasi dengan efisiensi dalam penggunaanya. |
| 2. | Muttaqin F (2016), Efisiensi Sektor Publik Dalam | Metode yang digunakan dalam analisis yaitu dengan metode alat |

| | | |
|---|---|---|
| | Pembangunan Ekonomi di DIY | analisis DEA, yang telah menghasilkan bahwa penelitian tersebut memaparkan bahwa pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota di DIY memiliki tingkat efisiensi yang optimal yaitu 100% yang artinya bahwa variabel input PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, secara efektif dapat meningkatkan pertumuhan ekonomi yang dilihat dari variabel outputnya yaitu PDRB, penduduk tidak miskin, namun ada satu Kabupaten di DIY yaitu Kulon Progo merupakan daerah yang memiliki tingkat ketidak efisienan dalam pengelolaan keuangan karena terjadi pemborosan penengeluaran pada alokasi dana PAD di Kulon Progo. |
| 3. | Merini D. (2012), Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Kawasan Asia Tenggara | Menggunakan metode DEA, Penelitian ini mengulas tentang teknis efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor publik di Kawasan ASEAN, model optimalisasi yang digunakan adalah meminimalisasi input (input-oriented model) yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar kualitas input dapat dikurangi untuk menghasilkan output yang optimal tanpa mengubah jumlah output. Dalam penelitian ini telah dihasilkan hasil dari analisis DEA yang bervariasi di kawasan Asia Tenggara, dimana Singapore mejadi negara yang tingkat efisiensinya secara rata-rata tertinggi di ketiga sektor, sementara Malaysia berdasarkan analisis mengalami inefisiensi paling parah, negara berpenghasilan menengah keatas cenderung memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi pada sektor publik sehingga tidak efisien adapun negara tersebut yaitu Mlaysia,Brunei |

| | | |
|---|---|---|
| | | Darussalam, dan Vietnam, sedangkan negara dengan kategori miskin seperti Cambodia dan Laos meskioun memiliki tingkat efisien yang relative tinggi tetapi dalam pelayanan publik merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang pelayanan publiknya- paling buruk baik di sektor kesehatan dan pendidikan. Tingkat efisiensi tinggi dikarenakan tingkat input yang rendah. Untuk negara yang memiliki derajat efisiensi di zona tengah seperti Indonesia dan Phillipines dapat meningkatkan derajat efisiensi dengan cara melakukan pengurangan input pada tingkat output yang tetap melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran dan atau sebaliknya meningkatkan ouput pada tingkat input yang tetap. Adapun input yang dimaksud adalah variabel pengeluaran pemerintah seperti belanja pemerintah, pembiayaan pemerintah, dan investasi serta outputnya merupakan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, industri, dll. |

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu alokasi pengeluaran sektor publik yang berasal dari input pendapatan suatu wilayah yang digunakan untuk sebuah pembangunan wilayah baik ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sebagai output dengan metode FDH maupun DEA dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi di masing-masing wilayah berbeda, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan input di masing-masing wilayah begitupun dalam pengalokasiannya untuk menghasilkan output, dapat juga dilihat inefisiensi yang terjadi dengan menggunakan metode dalam penelitian-penelitian tersebut.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan metode DEA dalam mengihitung tingkat efisiensi sektor publik dalam hal ini pendapatan pemerintah, dalam menghasilkan output pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, adapun variabel serta hasil akan di jelaskan pada berikutnya. Sehingga dengan metode tersebut dapat mengevaluasi untuk dapat mencapai efisiensi dalam sektor publik, berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian dan Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.

Efisiensi dalam manajemen perusahaan atau tata kelola perusahaan sangat dibutuhkan demi kelangsungan perusahaan tersebut. Perusahaan dalam proses produksi dapat menggunakan satu input variabel ataupun lebih input variabel dalam menciptakan efisiensi. Guntur Riyanto (2009:21) memaparkan bahwa efisiensi sebuah perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi teknis yang mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh output maksimal dari rangkaian input tertentu. Komponen lainnya yaitu efisiensi alokatif yang mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menggunakan input dalam proporsi optimal, mengingat adanya harga respektif dan teknologi

produksi. Kedua ukuran tersebut selanjutnya digabungkan untuk memberikan sebuah ukuran total efisiensi ekonomi.

Dalam menganalisis suatu perekonomian hal yang perlu diutamakan adalah memusatkan perhatian pada konsep efisiensi alokatif atau efisiensi (kadang-kadang disebut efisiensi Pareto atau Optimalisasi Pareto). Suatu perekonomian adalah efisien apabila ia menyediakan bagi para konsumennya sekumpulan barang dan jasa yang paling diinginkan, dengan sumber daya-sumber daya dan teknologi tertentu dari perekonomian (Samuelson & Nordhaus, 2003).

Lebih lanjut lagi menurut pendapat Samuelson & Nordhaus (2003), efisiensi alokatif (atau efisiensi) dapat terjadi apabila tidak ada kemungkinan reorganisasi produksi yang dapat membuat seseorang dalam keadaan lebih baik tanpa membuat seseorang yang lain dalam keadaan yang lebih buruk. Dalam kondisi-kondisi efisiensi alokatif, kepuasan atau utilitas satu orang dapat ditingkatkan hanya dengan menurunkan utilitas seseorang yang lain.

### 2.2.2 Sektor Publik

Sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009).

Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam arti luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan membicarakan metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan (Bastian, 2001).

### 2.2.3 Efisiensi Sektor Publik

Efisiensi pada layanan publik sangat diperlukan. Tujuan dari efisiensi layanan publik tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini adalah sumber pendapatan daerah sebagai input yang dikelola untuk kemudian menghasilkan sejumlah output atau layanan publik serta memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi (Chusnal, 2014).

Menurut pendapat Antony dan Herzlinger dalam Susilo (2013), menyatakan bahwa sektor publik disediakan dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kinerja sektor publik sendiri dapat dilihat dengan tolak ukur berapa banyak pelayanan yang diberikan dan disediakan untuk masyarakat serta bagaimana kualitas dari pelayanan yang disediakan.

### 2.2.4 Pembangunan Ekonomi

#### *2.2.4.1 Definisi Pembangunan Ekonomi*

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006).

Menurut Rostow dalam Arsyad (2004), proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisonal *(the traditional society)*, prasyarat untuk tinggal landas *(the preconditions for take off)*, tinggal landas *(the take-off)*, menuju kedewasaan *(the drive to maturity)*, dan masa konsumsi tinggi *(the age of high mass-consumption)*. Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multi-dimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

Selanjutnya menurut Rostow dalam Arsyad (2004), disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
3. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.

Perubahan sikap hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya perubahan sikap yang tadinya kurang mengahargai waktu, kurang menghargai prestasi perorangan, dan sebagainya).

#### *2.2.4.2 Pembangunan Ekonomi Daerah*

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses usaha pemerintah daerah bersinergi bersama masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan dengan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Adisasmita, 2014).

Selanjutnya menurut Adisasmita (2014), masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhususan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi

ini mengarahkan kepada pengambilan keputusan, inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Ada beberapa teori untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah, pertama teori basis ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Kedua, teori kawasan, teori ini sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan yang dianggap paling tepat di suatu daerah.

### 2.2.5 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya (Kuncoro, 2014).

Kuncoro (2014), menambahkan bahwa lima isu sentral yang sering menjadi perdebatan dalam desentralisasi fiskal adalah alokasi dari masing-masing fungsi fiskal, efektifitas penugasan penerimaan, instrumen perpajakan yang tepat, peranan dana transfer pemerintah dan pengalihan tanggung jawab dari pusat ke daerah. Kelima isu sentral ini seringkali dijadikan pertanyaan peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Secara umum perekonomian akan mengalami pertumbuhan secara natural dari waktu ke waktu, dengan adanya kebijakan desntralisasi fiskal diharapkan

pertumbuhan ekonomi akan terjadi lebih cepat dan lebih besar dibandingkan secara natural karena kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan dalam efisiensi pada sektor publik. Pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal mempunyai hubungan secara bersamaan karena adanya beberapa penyebab yaitu pada pertumbuhan terlihat obyek dari desentralisasi fiskal yaitu efisiensi alokasi sumber daya pada sektor publik, kemudian secara tegas tujuan dari pemerintah dalam mengadopsi kebijakan ini adalah untuk menunjang kenaikan pendapatan perkapita dan yang terakhir pendapatan perkapita merupakan suatu ukuran yang lebih mudah dan dapat menjelaskan keadaan ekonomi dibandingkan dengan indikator yang lain (Apriesa dan Miyasto, 2013).

### 2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

#### *2.2.6.1 Pertumbuhan Ekonomi*

Bertambahnya produksi barang dan jasa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian merupakan definisi dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai acuan apresiasi terhadap pengukuran tingkat perkembangan dari suatu perekonomian dalam mengelola sumber daya. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan riil yang dicapai suatu negara. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitas (Utomo dan Hadi, 2009).

Boediono (1999), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Maksudnya adalah perekonomian dapat berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan output per kapita. Output per kapita adalah output total yang dibagi dengan jumlah penduduk. Ada dua sisi hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan output per kapita yaitu dari sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Aspek yang terakhir aspek perspektif jangka panjang. Aspek ini beranggapan bahwa suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama output per kapita mengalami kenaikan. Sehingga teori ini mendefinisikan bahwa teori pertumbuhan ekonomi adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat saling mempengaruhi.

#### *2.2.6.2 Produk Domestik Regional Bruto*

Indikator makro ekonomi yang digunakan untuk megetahui tingkat atau kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah dengan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2011).

Adisasmita (2014) mengungkapkan bahwa, alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah:

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2014), untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi data PDRB adalah data PDRB atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada suatu periode tertentu. Tanpa memperhitungkan tekanan inflasi, PDRB selain dapat digunakan untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi, bermanfaat pula untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dihitung dengan menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena pertumbuhan PDRB dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat daripada tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDRB.

### 2.2.7 Pendapatan Daerah

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

### 2.2.8 Pendapatan Asli Daerah

Munurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-Lain PAD yang sah.

### *2.2.8.1 Pajak Daerah*

Sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Adapun definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (1997) adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Di samping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu PAD diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan perpajakan daerah dilakukan. Salah satu penguatan daerah dengan pemberian diskresi penetapan tarif dan pendaerahan beberapa jenis pajak baru seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dan Pajak Bumi Bangunan – Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). UU Nomor 28/2009 mengatur tentang 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota (Kuncoro, 2014). Tabel 2.1 menyajikan 16 jenis pajak daerah ini.

**Tabel 2 2 Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28/2009**

| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| 1. Pajak Kendaraan Bermotor<br>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor<br>3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor<br>4. Pajak Air Permukaan<br>5. Pajak Rokok | 1. Pajak Hotel<br>2. Pajak Restoran<br>3. Pajak Hiburan<br>4. Pajak Reklame<br>5. Pajak Penerangan Jalan<br>6. Pajak Parkir<br>7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan<br>8. Pajak Air Tanah<br>9. Pajak Sarung Burung Walet<br>10. PBB Pedesaan Perkotaan<br>11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |

Sumber : Kemenkeu (2014)

### *2.2.8.2 Retribusi Daerah*

Selain pajak daearah yang merupakan penyumbang dana pendapatan daearah yaitu adalah retribusi daerah, di Provinsi Bali sendiri termasuk kedalam provinsi yang memiliki retribusi yang tinggi. Retribusi didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Adisasmita (2014), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah atau kepentingan umum atau karena diberikan layanan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis retribusi dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

#### *2.2.8.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*

Hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antaral lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BPK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (Prakoso, 2011).

Dalam penjelasan umum berdasarkan UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah menjelaskan bahwa Perusahaan daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

#### *2.2.8.4 Lain-lain PAD yang Sah*

Berdasarkan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 Ayat 2, Lain-lain PAD yang sah meliputi:

a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Pendapatan Bunga

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 2.2.9 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro 2014). Menurut Adisasmita (2014), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut adalah saling mengisi dan melengkapi.

Menurut UU No. 25/1999 pasal 6 dan UU No. 33/2004 pasal 10, Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil, yang terdiri atas PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam); (2) Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### *2.2.9.1 Dana Alokasi Umum (DAU)*

Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula dengan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah yang lebih kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk DAU (Kuncoro, 2014).

Secara definisi, Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003):

1. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal, yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.

2. Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan terjadinya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisir ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah. Dana Alokasi Umum terdiri dari:

    a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

    b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Propinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan. Porsi daerah provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia (Adisasmita, 2014).

#### *2.2.9.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)*

Dana Alokasi Khusus adalah dana bantuan yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu seperti kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional dialokasikan berdasarkan usulan daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN. Yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya (Adisasmita, 2014).

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan kepada daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintah pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi (Kuncoro, 2014):

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

UU No. 25/1999 pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan rumus DAU, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. 40% dari penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK. DAK diberikan kepada

daerah tertentu berdasarkan usulan daerah dengan penyediaan Dana Pendamping 10% yang berasal dari penerimaan umum APBD (Kuncoro, 2014).

#### *2.2.9.3 Dana Bagi Hasil*

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, UU No. 25/1999 pasal 6 dan UU No. 33/2004 pasal 12 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat berasal dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Pajak penghasilan orang pribadi kemudian juga menjadi subjek peraturan pembagian pajak (Kuncoro, 2014).

Sementara itu, penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri atas dua jenis, yaitu (Kuncoro, 2014):

1. Penerimaan Pajak, terdiri dari:

    a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

    b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB)

    c. PPh Orang Pribadi.

    2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA), yang mencakup:

    a. Sektor Kehutanan

    b. Sektor Pertambangan Umum

    c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam

d. Sektor Perikanan

### 2.2.10 Lain - lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain adalah hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adisasmita, 2014).

### 2.2.11 Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketika orang mengalami berbagai ancaman yang mengancam kesejahteraan hidup mereka, seperti ketidakcukupan konsumsi makanan, kerentanan, pendidikan yang terbatas, dan ketidakmampuan dalam mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh gagalnya infrastruktur pemerintah dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari, termasuk persediaan air bersih, sanitasi dan tempat tinggal, serta kurangnya kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara sejajar dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan politik (Tukiran, dkk., 2007).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi setiap penduduk miskin (BPS, 2013).

Menurut Kuncoro (2014), Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Formula menghitung garis kemiskinan adalah:

$$GK = GKM + GKNM$$

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 juta jenis komoditi. Formula dasar dalam menghitung GKM adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk}.\, Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Keterangan:

$GKM_j$ = Garis Kemiskinan Makanan Daerah j

$P_{jk}$ = Harga Komoditi k di daerah j

$Q_j$ = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j

$V_{jk}$ = Nilai Pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j

j = daerah (perkotaan atau pedesaan)

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Rumus menghitung persentase penduduk miskin adalah:

$$P_a = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^a$$

Keterangan:

α = 0

z = garis kemiskinan

$y_i$ = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk dibawah GK

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

### 2.2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

Badan Pusat Statistik (2016) mengatakan bahwa IPM menjadi indeks komposit atau gabungan yang merepresentasikan tiga dimensi pembangunan

manusia yang paling mendasar yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan nilai indeks yang mewakili ketiga dimensi tersebut maka nilai IPM pada level provinsi/kabupaten/kota dapat dihitung menggunakan formula rata-rata geometrik sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$$

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni:

- IPM kelompok "rendah" dengan kriteria nilai IPM < 60
- IPM kelompok "sedang" dengan kriteria 60 ≤ Nilai IPM < 70
- IPM kelompok "tinggi" dengan kriteria 70 ≤ Nilai IPM < 80
- IPM kelompok "sangat tinggi" dengan kriteria Nilai IPM ≥ 80

Badan Pusat Statistik (2016) mengatakan bahwa tingkat kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu dapat diketahui menggunakan pendekatan pertumbuhan IPM. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah mencapai nilai maksimalnya dan semakin rendah pertumbuhan maka semakin lambat mencapai nilai maksimal. Secara umum, pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh pada periode t dengan capaian pada periode sebelumnya (t-1). Formula penghitungannya adalah:

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

## 2.3 Kerangka Pemikiran

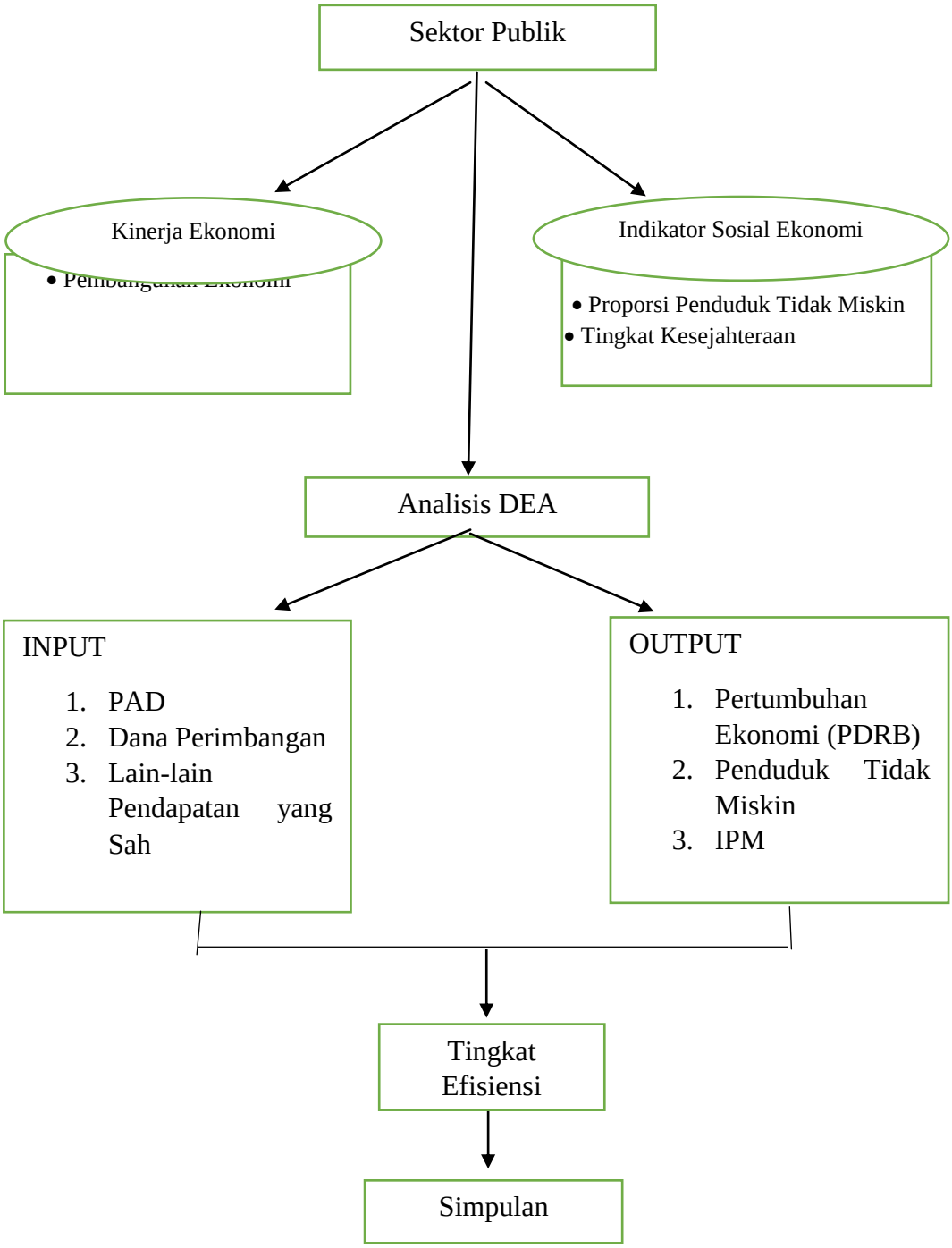

Sektor Publik dalam hal ini yaitu kinerja ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial ekonomi yang berorientasi pada proporsi penduduk tidak miskin dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam penelitian ini dilakukan analisis pada sektor publik tersebut dengan menggunakan metode analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) dimana dalam operasinya menggunakan variabel input yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah, variabel input disini adalah variabel yang berasal dari pendapatan daerah yang dimana di alokasikan ke sektor publik untuk menghasilkan output (Pembangunan Ekonomi) dan sebagai variabel outputnya yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Penduduk Tidak Miskin, serta indikator kesejahteraan yaitu IPM, variabel output sendiri merupakan capaian dari suatu pembangunan ekonomi yang berasal dari input pada setiap daerah. Setelah dilakukan operasi melalui metode DEA maka tingkat efisiensi dan inefisiensi ditampilkan dari hasil data variabel input dan data variabel output pada masing-masing daerah, dan kemudian akan disimpulkan tingkat efisiensi dari beberapa input dalam menghasilkan sejumlah output sesuai data pada setiap daerah.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang dipublikasi oleh instansi atau organisasi yang bukan pengelolanya, dan laporan tahunan yang ada di daerah setempat. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa instansi atau sumber-sumber lain. Adapun data yang digunakan antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Kemiskinan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), dalam metode ini memerlukan data variabel yang terdiri dari variabel input dan variabel output, suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

A. Variabel input

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana dari pemerintah pusat untuk dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam menjalankan pelaksanaan desentralisasi, yang bersumber dari APBN.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Padapatan ini antara lain yaitu dari hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Variabel Output

1. Pertumbuhan Ekonomi

Merupakan peningkatan dalam sistem perekonomian atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai tambah dari produksi barang dan jasa masyarakat daerah (PDRB) yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kemiskinan

Kondisi dimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah sehingga mengancam mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri untuk konsumsi, kebutuhan untuk mendapatkan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainya.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merupakan indeks pembangunan manusia yang mengukur capaian dari pembangunan antara lain yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

## 3.3 Metode Analisis Data Penelitian

Pada penelitian ini, *Data Envelopment Analysis* (DEA) merupakan alat analisis yang digunakan untuk operasional secara matematika untuk mengukur tingkat efisiensi teknik suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang memiliki banyak input dan banyak output kemudian membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain.

### 3.3.1 Konsep Dasar *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Dalam mengukur efisiensi, DEA mengidentifikasikan unit yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan, yang merupakan keuntungan utama dalam aplikasi manajerial. Selain itu, DEA tidak memerlukan spesifikasi yang lebih lengkap dari bentuk fungsi yang menunjukkan hubungan produksi dan distribusi dari observasi. Teori DEA memiliki beberapa konsep nilai yang digunakan sebagai dasar proses manajerial yaitu (PAU UGM, 2000):

a. Nilai rasio efisiensi bersifat relatif, berarti DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap unit ekonomi yang relatif terhadap sampel unit lain. Hal ini dapat digunakan untuk melihat unit ekonomi yang membutuhkan perbaikan manajerial.
b. DEA menunjukkan unit ekonomi yang memiliki efisiensi sempurna dengan nilai 100% dan yang kurang efisien dengan nilai <100%. Disamping itu terdapat angka multiplier yang digunakan sebagai dasar perbaikan manajerial.
c. DEA menyajikan matriks efisiensi silang yang dapat menunjukkan unit ekonomi efisiensi dengan input berbeda dan menghasilkan output yang berbeda dengan unit ekonomi lain.

Dalam penelitian ini, DEA digunakan disamping secara operasional kebijakan, dapat juga digunakan untuk merekomendasikan pembenahan bagi manajerial secara individu maupun secara kelompok yang kurang efisien untuk menjadi efisien.

Inti dari DEA adalah menentukan bobot atau timbangan untuk setiap output dan input UKE. Bobot tersebut memiliki sifat:

1. Tidak bernilai negatif
2. Bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (*total weight output/total weight input*) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input $\leq 1$).

DEA (*Data Envelopment Analysis*) untuk suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dapat diformulasikan sebagai program linier fraksional, yang solusinya

dapat diperoleh jika model tersebut ditransformasikan ke dalam program linier dengan bobot dari input dan output Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) tersebut sebagai variabel keputusan (*decision variables*).

DEA merupakan perhitungan efisiensi, teknik relatif. Hipotesis untuk hasil perhitungan DEA adalah:

a. UKE kurang efisien apabila efisiensi < 100%

b. UKE efisien apabila efisiensi = 100%

### 3.3.2 Formulasi DEA

Penerapan program linear pada DEA. Misal, kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misalkan n. Setiap UKE menggunakan m jenis input yang menghasilkan s jenis output. Misal, Misalnya Xij>0 merupakan jumlah input i yang digunakan oleh UKE j, dan misalkan Yrj>0 merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE j. Variabel keputusan (*decision variabel*) dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh UKE k. Vik adalah bobot yang diberikan pada input i oleh unit kegiatan k dan Urk adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k. Sehingga Vik dan Urk merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui interaksi program linear fraksional (*fractional linear programs*), suatu formulasi program linear untuk setiap UKE dalam sampel. Fungsi tujuan (*objective function*) dari setiap program linear fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total (total weighted output) dari UKE k dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan tersebut adalah sebagai berikut (PAU UGM, 2000) :

Maksimumkan $Z_k = \frac{\sum_{r=1}^{s} U_{rk}.Y_{rk}}{\sum_{i=1}^{m} V_{ik}.X_{ik}}$

Kriteria universalitas mensyaratkan UKE k untuk memiliki bobot dengan batasan atau kendala bahwa tidak ada satu UKE lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar 1 atau 100%, jika UKE lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh UKE k sehingga formulasi selanjutnya adalah:

$$\frac{\sum_{r=1}^{s} U_{rk}.Y_{rj}}{\sum_{i=1}^{m} V_{ik}.X_{ij}} \leq 1 \; ; \; j = 1, \dots, n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif:

$U_rk \geq 0$ ; r = 1,… ,s

$V_ik \geq 0$ ; r = 1,… ,m

Program linear fraksional kemudian ditransformasikan ke dalam program linear biasa (*ordinary linear program*), dan metode simpleks dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Transformasi program linear, yang disebut dengan DEA (*Data Envelopment Analysis*), adalah sebagai berikut:

DEA memaksimumkan $Z_k = \sum_{r=1}^{s} U_{rk}.Y_{rk}$

Dengan batasan atau kendala :

$$[P_{kj}] \quad \sum_{r=1}^{s} U_{rk}.Y_{rj} - \sum_{i=1}^{m} V_{ik} \; . \; X_{ij} \leq 0 \; ; \; j = 1, \dots, n$$

$$[q_k] \quad \sum_{i=1}^{m} V_{ik}.X_{ik} = 1$$

$$U_{rk} \geq 0 ; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0 ; r = 1, \dots, m$$

### 3.3.3 Kelebihan dan Kelemahan DEA

Metode DEA mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu (Setiawan, 2004):

1. Dapat menangani banyak input dan output dari sekumpulan UKE.
2. Tidak membulatkan asumsi hubungan fungsional antara input dan output.
3. Tidak mensyaratkan pengukuran tunggal untuk setiap UKE sehingga memudahkan untuk dibandingkan dengan UKE yang lain.

Disamping memiliki kelebihan, DEA juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

1. Pengukuran efisiensi DEA menghasilkan tingkat efisiensi relatif, artinya tingkat efisiensi jika dibandingkan dengan UKE yang lain dan sangat rentan terhadap kesalahan pengukuran sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak valid.
2. Karena DEA merupakan metode *nonparametric*, sehingga sangat sulit dilakukan uji pengukuran statistik.

# BAB IV

# ANALISA DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum

### 4.1.1 Pendapatan Regional

Suatu sistem perekonomian daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian kesejahteraan masyarakat yang dapat ditunjukkan oleh jumlah penduduk suatu daerah yang tergolong tidak miskin, serta tingkat pembangunan manusia berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah dalam satu periode yang dapat ditunjukkan berdasarkan pendapatan regional daerah dalam satu periode yang ditentukan. Berdasarkan pendapatan daerah tingkat pembangunan ekonomi daerah dalam suatu periode tertentu dapat terlihat kondisinya.

#### *4.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang terpercaya, beberapa data telah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainya yang terkait dan relevan dengan objek yang diteliti mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 di Provinsi Bali.

**Tabel 4.1 PDRB Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali**

**Tahun 2013-2015 (Ribu Rupiah)**

| Kabupaten/kota | PDRB | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jembrana | 7,769,853,320 | 9,019,794,418 | 10,273,392,220 |
| Tabanan | 12,967,299,394 | 15,066,196,306 | 17,203,020,168 |
| Badung | 31,790,032,210 | 37,063,283,607 | 41,282,878,388 |
| Gianyar | 15,367,796.28 | 17,908,552.305 | 20,052,659.024 |
| Klungkung | 4,899,877,699 | 5,676,418,492 | 6,412,461,405 |
| Bangli | 3,779,487,800 | 4,381,649,267 | 4,990,418,202 |
| Karangasem | 9,293,057,865 | 10,785,130,056 | 12,303,827,673 |
| Buleleng | 19,144,314,878 | 22,339,136,193 | 25,491,795,174 |
| Denpasar | 29,389,253,732 | 34,209,864,524 | 38,463,727,400 |
| **Rata-rata** | **13,227,616,077.148** | **15,395,486,823.923** | **17,382,397,032.114** |

Sumber : BPS

Berdasarkan data yang telah diperoleh seperti yang dipaparkan pada tabel 4.1 dapat dilihat tingkat PDRB tertinggi telah dicapai oleh Kabupaten Badung, pada tahun 2013-2015 telah mengalami peningkatan PDRB secara berkelanjutan yaitu mulai dari tahun 2013 PDRB Kabupaten Badung sebesar Rp 31,790,032,210,000 dan tahun 2014 sebesar Rp 37,063,283,607,000 hingga pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 41,282,878,388,000 sedangkan daerah dengan PDRB terendah yaitu Kabupaten Gianyar sebesar Rp 15,367,796,280 pada tahun 2013, 17,908,552,305 pada tahun 2014 serta pada tahun 2015 sebesar Rp 20,052,659,024 tetapi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata nilai PDRB di Provinsi Bali sebesar Rp 13,227,616,077,148 pada tahun 2013, pada tahun 2014 sebesar Rp 15,395,486,823,923 dan di tahun 2015 sebesar Rp 17,382,397,032,114, berdasarkan hasil nilai rata-rata PDRB di Provinsi Bali masih terdapat beberapa daerah yang mengalami tingkat PDRB yang berada

dibawah nilai PDRB rata-rata, sehingga terdapat ketimpangan antar daerah di Provinsi Bali.

### 4.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu probelmatika dalam suatu sistem perekonomian yang menghambat pertumbuhan ekonomi, beberapa kategori kemiskinan dalam kehidupan masyarakat yaitu seperti ketidakcukupan konsumsi makanan, kerentanan, pendidikan yang terbatas, daya beli masyarakat yang rendah, ketidakmampuan mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Tingkat kemiskinan merupakan acuan dari tingkat pembangunan ekonomi. Semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin baik tingkat pembangunan ekonomi.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tidak Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2015 (jiwa)**

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Tidak Miskin | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jembrana | 253,099 | 254,071 | 255,738 |
| Tabanan | 408,166 | 408,992 | 411,838 |
| Badung | 574,511 | 587,391 | 602,038 |
| Gianyar | 465,248 | 468,084 | 472,276 |
| Klungkung | 161,710 | 162,546 | 163,559 |
| Bangli | 208,010 | 208,332 | 209,845 |
| Karangasem | 376,484 | 376,918 | 378,293 |
| Buleleng | 598,023 | 598,688 | 602,646 |
| Denpasar | 828,684 | 844,514 | 859,554 |
| **Rata-rata** | **430437** | **434393** | **439532** |

Sumber : BPS

Data pada tabel 4.2 telah memaparkan bahwa tingkat kemiskinan terendah terdapat pada Kota Denpasar dilihat berdasarkan jumlah penduduk tidak miskin yang terbanyak pada daerah tersebut yaitu sebesar 828,684 jiwa pada tahun 2013, 2014 sebesar 844,514 hingga 859,554 jiwa pada tahun 2015, yang berati bahwa

setiap tahun berdasarkan data (tabel 4.2) terjadi pengurangan penduduk miskin, sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten Klungkung berdasarkan jumlah penduduk tidak miskin di Kabupaten Klungkung sesuai pada tabel diatas. Telah dipaparkan juga rata-rata dari jumlah penduduk tidak miskin pada data diatas dan dapat disimpulkan bahwa masih banyak daerah di Provinsi Bali yang masih di bawah rata-rata jumlah kemiskinannya.

### 4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indeks sebagai indikator untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses dari hasil pembangunan daerah dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, yang meliputi 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak yang menghasilkan kesejahteraan untuk menunjang produktifitas dalam usaha meningkatkan taraf hidup yang lebih baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian. Berikut data IPM di Provinsi Bali :

**Tabel 4.3 Tingkat Indeks Pebangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

| Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Manusia | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jembrana | 68.39 | 68.67 | 69.66 |
| Tabanan | 72.31 | 72.68 | 73.54 |
| Badung | 77.63 | 77.98 | 78.86 |
| Gianyar | 74 | 74.29 | 75.03 |
| Klungkung | 68.08 | 68.3 | 68.98 |
| Bangli | 65.47 | 65.75 | 66.24 |
| Karangasem | 63.7 | 64.01 | 64.68 |
| Buleleng | 68.83 | 69.19 | 70.03 |
| Denpasar | 81.32 | 81.65 | 82.24 |

Sumber : BPS

Berdasarkan data pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa daerah tertinggi capaian IPM terdapat pada Kota Denpasar secara keseluruhan setiap tahunya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, kemudian terendah terdapat pada Kabupaten Karangasem dan secara keseluruhan setiap tahunya dari tahun 2013 hingga 2015 tetap terendah tingkat IPM pada kabupaten Karangasem.

### 4.1.4 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang didapat di daerah itu sendiri. Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### 4.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri yang berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan undang-undang. Maka pemerintah daerah melakukan pungutan untuk mengumpulkan dana, guna keperluan daerah membiayai kegiatannya. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

**Tabel 4.4 PAD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

**Tahun 2013-2015 (Ribu Rupiah)**

| Kabupaten/Kota | PAD | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jembrana | 54,775,109 | 65,680,235 | 72,832,071 |
| Tabanan | 182,799,113 | 212,931,601 | 243,793,958 |
| Badung | 1,874,766,393 | 2,197,959,213 | 2,581,898,769 |
| Gianyar | 238,558,925 | 312,160,449 | 370,679,368 |
| Klungkung | 48,541,694 | 69,749,456 | 89,563,450 |
| Bangli | 42,000,000 | 55,200,000 | 82,000,000 |
| Karangasem | 140,991,228 | 160,008,363 | 205,273,392 |
| Buleleng | 128,000,000 | 176,133,800 | 221,903,000 |
| Denpasar | 513,061,591 | 610,266,592 | 681,259,855 |
| **Rata-rata** | **358,166,006** | **428,898,857** | **505,467,096** |

Sumber : BPS

Data diatas menunjukkan besar penerimaan PAD pada masing-masing daerah di Provinsi Bali, terdapat penerimaan PAD tertinggi yaitu pada Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp 1,874,766,393,000 tahun 2013 dan secara terus menerus meningkat yaitu Rp 2,197,959,213,000 dan 2015 sebesar Rp 2,581,898,769,000 hal ini karena didukung dari hasil penerimaan retribusi pajak hotel dan restoran (PHR) yang merupakan sumber pendapatan yang terbesar pada daerah tersebut, adapun PAD yang terkecil terdapat pada Kabupaten Bangli, serta masih terdapat beberapa daerah di Provinsi Bali yang masih dibawah rata-rata nilai PAD Provinsi Bali, karena adanya selisih yang tinggi penerimaan PAD antar daerah pada setiap tahunya berdasarkan sumber daya dan sektor-sektor masing-masing daerah yang berbeda-beda.

#### 4.1.4.1.1 Pajak Daerah

Sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang

ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Di samping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

#### 4.1.4.1.2 Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan/badan. Jadi dalam hal retribusi daerah, balas jasa atas adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut. Demikian juga retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi lainnya.

### 4.1.4.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin membaik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 dana perimbangan berasal dari bagi hasil pusat dan daerah yaitu PBB, BPHTB, sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

**Tabel 4.5 Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2015 (Ribu Rupiah)**

| Kabupaten/Kota | Dana Perimbangan | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jembrana | 511,597,033 | 550,401,204 | 29,732,457 |
| Tabanan | 730,08749,7 | 798,650,500 | 107,177,945 |
| Badung | 404,924,830 | 356,523,053 | 55,276,625 |
| Gianyar | 638,872,430 | 684,180,739 | 73,111,095 |
| Klungkung | 507,661,415 | 531,480,691 | 39,436,391 |
| Bangli | 511,399,438 | 548,602,929 | 44,715,580 |
| Karangasem | 642,839,138 | 701,929,283 | 50,855,032 |
| Buleleng | 906,226,901 | 957,813,099 | 99,931,800 |
| Denpasar | 656,582,041 | 715,256,133 | 76,600,000 |
| **Rata-rata** | **612,243,413** | **649,426,403** | **64,092,992** |

Sumber : BPS

Data Dana Perimbangan pada tabel 4.5 Provinsi Bali tersebut menampilkan bahwa dana perimbangan yang terbesar yaitu pada Kabupaten Buleleng, pada tahun 2013 sebesar Rp 906,226,901,000 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 957,813,099,000 namun pada tahun 2015 dana perimbangan terbesar terdapat pada Kabupaten Tabanan yaitu sebesar Rp 107,177,945,000. Berdasarkan perhitungan rata-rata secara umum dana perimbangan Provinsi Bali yang berasal dari APBD dari tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat sebesar Rp 37,182,990,000. Kemudian pada tahun 2015 justru mengalami penurunan yang pada tahun 2014 ke

tahun 2015 turun sebesar Rp 585,333,411,000 telah terjadi penurunan yang signifikan, karena sejalan dengan peningkatan rata-rata penerimaan PAD di masing-masing daerah pada Provinsi Bali.

#### 4.1.4.2.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Propinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan. Porsi daerah provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.

#### 4.1.4.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN. Yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi khusus meliputi biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum yang sejenis.

### 4.1.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 4.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2015 (Ribu Rupiah)**

| Kabupaten/Kota | Lain-lain Pendapatan yang Sah | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jembrana | 127,400,047 | 150,223,992 | 193,487,333 |
| Tabanan | 197,924,187 | 249,360,434 | 356,973,795 |
| Badung | 215,006,133 | 250,262,566 | 319,819,244 |
| Gianyar | 189,868,058 | 191,528,894 | 302,667,635 |
| Klungkung | 57,411,879 | 66,159,107 | 192,070,609 |
| Bangli | 99,798,044 | 117,832,285 | 170,118,230 |
| Karangasem | 174,465,047 | 254,433,569 | 294,697,362 |
| Buleleng | 252,539,384 | 334,309,904 | 469,797,038 |
| Denpasar | 109,116,680 | 141,998,438 | 341,860,318 |
| **Rata-rata** | **158,169,940** | **195,123,243** | **293,499,063** |

Sumber : BPS

Berdasarkan data pada tabel 4.6 menunjukkan besar lain-lain pendapatan yang sah di masing-masing daerah Provinsi Bali menurut perhitungan rata-rata pada tahun 2013 sebesar Rp 158,169,940,000 tahun 2014 Rp 195,123,243,000 dan tahun 2015 yaitu sebsar Rp 293,499,063,000 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 67,664,562,000. Adapun daerah yang menerima pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah terkecil yaitu pada Kabupaten Klungkung tetapi hanya pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan di tahun 2015 penerimaan terkecil terjadi pada Kabupaten Bangli. Kemudian yang pada setiap tahunya mempunyai penerimaan lain-lain pendapatan yang sah terbesar yaitu Kabupaten Buleleng dan terus mengalami peningkatan tahun ke tahun.

## 4.2 Analisis Data dan Pembahasan

Pembangunan ekonomi regional memiliki tujuan dalam usaha mencapai keberhasilan meningkatkan pendapatan total perkapita dengan memperhatikan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental struktur ekonomi suatu daerah yang bertujuan untuk meraih keberhasilan pembangunan ekonomi, berbagai kebijakan yang dilakukan diantaranya dapat digolongkan sebagai kebijakan fiskal daerah atau pengelolaan keuangan daerah dengan mengontrol pendapatan dan pengeluaran melalui APBD.

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola keuangannya. Melalui kebijakan ini pemerintah mengelola keuangan tersebut untuk mencapai keberhasilan pembangungan ekonomi daerah. Ada beberapa indikator yang diamati yaitu struktur penerimaan, pengeluaran dan dampak terhadap pembangunan ekonomi regional. Variabel yang dipilih berdasarkan besarnya peranan terhadap kapasitas keuangan daerah dan dampak terhadap perekonomian daerah, lalu kedekatan antara hubungan variabel. Artinya variabel input dianggap sangat erat hubungannya dengan pencapaian variabel output.

Variabel output yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil berdasarkan perhitungan dari PDRB riil perkapita penduduk dikali dengan jumlah penduduk. PDRB menjelaskan kondisi dan dapat menjelaskan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2. Jumlah penduduk tidak miskin sebagai variabel yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), variabel IPM mencerminkan tingkat keberhasilan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan ekonomi dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Adapun variabel input meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran tingkat efisiensi berdasarkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang menganalisis input dan output suatu daerah. Penelitian ini melakukan perhitungan tingkat efisiensi mulai pada tahun 2013 sampai dengan

tahun 2015 pada masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode DEA telah diperoleh tabel efisiensi untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Tabel 4.7 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (persen %)**

| Kabupaten/Kota | Tingkat Efisensi | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jembrana | 100 | 100 | 100 |
| Tabanan | 87.89 | 81.61 | 74.87 |
| Badung | 100 | 100 | 100 |
| Gianyar | 90.74 | 89.73 | 81.44 |
| Klungkung | 100 | 100 | 96.05 |
| Bangli | 100 | 100 | 100 |
| Karangasem | 89.33 | 88.45 | 82.40 |
| Buleleng | 100 | 100 | 95.83 |
| Denpasar | 100 | 100 | 100 |
| **Rata-rata** | **96.44** | **95.53** | **92.28** |

Sumber : BPS diolah

Tabel 4.7 telah menunjukkan hasil olah data dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), berdasarkan hasil tersebut pada tahun 2013 di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa ketiga Kabupaten tersebut tidak effisien relatif 100%, adapun masing-masing tingkat efisiensi yang ditunjukkan yaitu pada Kabupaten Tabanan tingkat efisiensinya sebesar 87.89% , Kabupaten Gianyar 90.74%, kemudian Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 tingkat efisiensi pengelolaan keuangannya hanya sebesar 89.33% , sementara itu Kota Denpasar telah menunjukkan tingkat efisien relatif 100% dalam pengelolaan input daerah dan menghasilkan output daerah sesuai data yang diteliti tersebut. Pada tahun 2014 terlihat pada hasil olah data tersebut telah menunjukkan bahwa ketiga Kabupaten

yaitu Tabanan, Gianyar dan Karangasem masih menunjukkan hasil yang kurang dari 100% efisien, adapun tingkat efisiensi pada tahun 2014 masing-masing daerah yaitu Kabupaten Tabanan sebesar 81.61%, Kabupaten Gianyar sebesar 89.73% dan Kabupaten Karangasem menunjukkan tingkat efiseinsi sebesar 88.45%.

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah yaitu meliputi PAD, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah yang telah digunakan untuk mencapai pembangunan ekonomi masing-masing daerah dalam usaha meningkatkan PDRB, IPM, dan usaha dalam mengurangi kemiskinan sebagai output dari pembangunan ekonomi, telah ditunjukkan pada hasil tabel 4.7 pada tahun 2015 ketiga daerah yaitu Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Karangasem masih menujukkan hasil yang belum efisien 100%, ketiga daerah tersebut relative menunjukkan tingkat efisiensi yang menurun dari tahun ke tahun 2013-2015, sejalan hal tersebut pada tahun 2015 berdasarkan hasil olah data juga bertambah dua daerah yang menunjukkan tingkat efisiensi kurang dari 100% yaitu pada daerah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng, adapun masing-masing daerah tersebut dengan tingkat efisiensinya pada tahun 2015, Kabupaten Tabanan 74.87% yang tahun sebelumnya yaitu sebesar 81.61% tingkat efisiensinya, kemudian Kabupaten Gianyar sebesar 81.44%, Kabupaten Klungkung 96.05%, Kabupaten Karangasem 82.40% , dan Kabupaten Buleleng 95.83%.

Secara keseluruhan tingkat efisiensi pengelolaan dana sektor publik Provinsi Bali dari tahun 2013 huingga tahun 2015 telah mengalami penurunan

tingkat efisiensinya dalam mencapai pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.7 di atas.

Kemudian sejalan dengan terdapatnya inefisiensi pada sebagian daerah di Provinsi Bali menurut data penelitian ini telah ditunjukkan beberapa pengelolaan keuangan yang tidak efisien, berdasarkan perhitungan dengan metode DEA telah ditemukan beberapa pemborosan penggunaan keuangan daerah atau dengan kata lain terdapat pengalokasian keuangan untuk pembangunan ekonomi guna untuk meningkatkan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan yang kurang tepat, berdasarkan data-data penelitian ini yang telah diolah sebagai berikut (tabel 4.8) :

**Tabel 4 8 Penggunaan Input yang Efisien pada Output yang Dihasilkan dan Pemborosan (Ribu Rupiah)**

| Tahun | Kabupaten/Kota | Penggunaan Input yang Efisien | | | Pemborosan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAD | DP | LPS | PAD | DP | LPS |
| 2013 | Tabanan | 160,662,140 | 641,673,901 | 173,955,568 | 22,136,973 | 88,413,596 | 23,968,619 |
| 2013 | Gianyar | 216,468,369 | 579,712,843 | 172,286,276 | 22,090,556 | 59,159,587 | 17,581,782 |
| 2013 | Karangasem | 125,947,464 | 574,248,202 | 155,849,627 | 15,043,764 | 68,590,936 | 18,615,421 |
| 2014 | Tabanan | 173,773,480 | 651,778,673 | 203,503,050 | 39,158,121 | 146,871,827 | 45,857,384 |
| 2014 | Gianyar | 280,101,571 | 613,915,377 | 171,858,877 | 32,058,878 | 70,265,362 | 19,670,017 |
| 2014 | Karangasem | 141,527,397 | 620,856,451 | 225,046,492 | 18,480,966 | 81,072,832 | 29,387,077 |
| 2015 | Tabanan | 182,528,536 | 80,244,127 | 267,266,280 | 61,265,422 | 26,933,818 | 89,707,514 |
| 2015 | Gianyar | 301,881,277 | 59,541,676 | 246,492,522 | 68,798,091 | 13,569,419 | 56,175,113 |
| 2015 | Klungkung | 86,025,694 | 37,878,654 | 184,483,820 | 3,537,756 | 1,557,737 | 7,586,789 |
| 2015 | Karangasem | 169,145,275 | 41,904,546 | 242,830,626 | 36,128,117 | 8,950,486 | 51,866,736 |
| 2015 | Buleleng | 212,649,645 | 95,764,644 | 450,206,502 | 9,253,355 | 4,167,156 | 19,590,536 |

Sumber: BPS diolah
Catatan : Lampiran II
Keterangan : -PAD : Pendapatan Asli Daerah
-DP : Dana Perimbangan
-LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan analisis per unit (tabel 4.8), telah menunjukkan seberapa besar dana yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang sebaiknya digunakan untuk mencapai efisiensi 100% dan dalam hasil tersebut juga telah menunjukkan

seberapa besar pemborosan dana yang telah digunakan untuk pembangunan dalam usaha peningkatan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan pada masing-masing daerah yang telah terindikasi tidak efisien relatif 100% dalam pengelolaan keuangan pada sektor tersebut, pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Pemborosan yang terjadi berdasarkan data yang sudah diolah yaitu terdapat pada Kabupaten Tabanan terutama pada penggunaan dana perimbangan dari tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013 Kabupaten Tabanan menjadi daerah yang paling rendah tingkat efisiensinya yaitu sebesar 87,89%, maka berdasarkan analisis DEA telah memberikan solusi bahwa Kabupaten Tabanan harus mengurangi penggunaan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp 22,136,973, kemudian harus mengurangi dana perimbangan sebesar Rp 88,413,596 serta sebaiknya mengurangi penggunaan dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 23,968,619 dalam meningkatkan PDRB, IPM, dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Selanjutnya pada tahun 2014 Kabupaten Tabanan tetap menjadi daerah yang paling tidak efisien yaitu hanya mencapai tingkat efisiensi sebesar 81,61 %, agar mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka Kabupaten Tabanan dianjurkan untuk megurangi dana PAD sebesar Rp 39,158,121 mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp 146,871,827 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 45,857,384. Kemudian pada tahun 2015 Kabupaten Tabanan tetap menjadi daerah yang paling rendah

capaian tingkat efisiensinya, dan bertambah daerah yaitu Kabupaten Klungkung dan Buleleng.

Kemudian dalam analisis penelitian ini menampilkan *efficient reference set*, yaitu untuk mencapai efisiensi 100% pada daerah yang tidak efisien dapat mengacu pada daerah-daerah yang menjadi *efficient reference set* sesuai dengan daerah yang bersangkutan dan pada periode waktu yang diteliti, berikut adalah tabel yang menunjukkan *efficient reference set*.

**Tabel 4 9 Multiplier, Efisiensi dan Efficient Reference Set dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Tidak Efisien pada Tahun 2013-2015**

| Tahun | Kabupaten/Kota | Efisiensi (%) | Efficient Reference | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tabanan | 87.89 | Klungkung | 0.404 |
| | | | Bangli | 0.197 |
| | | | Buleleng | 0.223 |
| | | | Denpasar | 0.203 |
| 2013 | Karangasem | 89.33 | Jembrana | 0.348 |
| | | | Bangli | 0.207 |
| | | | Buleleng | 0.221 |
| | | | Denpasar | 0.136 |
| 2013 | Gianyar | 90.74 | Jembrana | 0.645 |
| | | | Buleleng | 0.024 |
| | | | Denpasar | 0.347 |
| 2014 | Tabanan | 81.61 | Jembrana | 0.714 |
| | | | Buleleng | 0.147 |
| | | | Denpasar | 0.166 |
| 2014 | Karangasem | 88.45 | Jembrana | 0.560 |
| | | | Buleleng | 0.253 |
| | | | Denpasar | 0.099 |
| 2014 | Gianyar | 89.73 | Jembrana | 0.653 |
| | | | Badung | 0.011 |
| | | | Denpasar | 0.350 |
| 2015 | Tabanan | 74.87 | Jembrana | 1.119 |
| | | | Denpasar | 0.148 |
| 2015 | Gianyar | 81.44 | Jembrana | 0.379 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bangli | 0.276 |
| | | | Denpasar | 0.369 |
| 2015 | Karangasem | 82.40 | Jembrana | 1.006 |
| | | | Denpasar | 0.141 |
| 2015 | Buleleng | 95.83 | Jembrana | 2.189 |
| | | | Denpasar | 0.078 |
| 2015 | Klungkung | 96.05 | Jembrana | 0.502 |
| | | | Bangli | 0.513 |

Sumber : BPS diolah
Catatan : Lampiran III

Menurut analisis DEA untuk mencapai efisien relatif 100%, maka masing-masing daerah sebaiknya merujuk pada daerah yang telah ditampilkan berdasarkan analisis ini.Untuk Kabupaten Tabanan yang tingkat efisiensinya hanya mencapai 87,89% dengan *benchmark* agar mencapai efisien relatif 100% dapat mengacu pada Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Denpasar dengan masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,404, 0,197, 0,223 dan 0,203 pada tahun 2013, kemudian untuk tahun 2014 pengeloaan keuangan tersebut agar efisien Kabupaten Tabanan dapat merujuk pada daerah Jembrana, 0,714, Buleleng sebesar 0,147dan Denpasar 0,166. Kemudian pada tahun 2015 Tabanan merujuk pada daerah Jembrana 1,119 dan merujuk Denpasar dengan nilai *multiplier* 0,148. *Multiplier* tersebut berfungsi sebagai angka pengganda yang dinamis sebagai dasar untuk menyesuaikan input dan output Kabupaten Tabanan agar mencapai efisien relatif 100% begitupun untuk daerah-daerah lainya yang belum mencapai efisien relatif 100% dapat mencapai efisien dengan merujuk daerah lain berdasarkan multipliernya yang telah ditampilkan berdasarkan analisis DEA.

Pada Kabupaten Karangasem yang belum mencapai efisien relatif 100%, maka pada tahun 2013 dapat merujuk pada Jembrana dengan nilai *multiplier* 0,348, Bangli sebesar 0,207, Buleleng sebesar 0,221 dan Denpasar 0,136, di tahun 2014 Kabupaten Karangasem dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* 0,56, Buleleng sebesar 0,253 dan Denpasar sebesar 0,99. Sedangkan pada tahun 2015 Kabupaten Karangasem untuk mencapai efisien ralatif sebesar 100% maka dapat mengacu pada Kabupaten Jembrana sebesar 1,006 dan Kota Denpasar sebesar 0,141. Selanjutnya untuk Kabupaten Gianyar yang belum mencapai efisien relatif 100%, maka pada tahun 2013 dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* 0,645, Buleleng sebesar 0,24 dan Kota Denpasar sebesar 0,347, pada tahun 2014 Kabupaten Gianyar dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan kekurangan sebesar 0,653, Buleleng sebesar 0,11 dan Kota Denpasar sebesar 0,35. Sedangkan pada tahun 2015 Kabupaten Gianyar untuk mencapai efisien ralatif sebesar 100% maka dapat mengacu pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* sebesar 0,379, Bangli 0,276 dan Kota Denpasar sebesar 0,369.

Kemudian pada tahun 2015 telah bertambah jumlah daerah yang tidak mencapai efisien sempurna yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung, pada kedua daerah tersebut untuk mencapai efisien relatif 100% dapat merujuk daerah lain, menurut hasil analisis DEA menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng disarankan dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* 2,189 dan dapat merujuk pada Kota Denpasar sebesar 0,78 serta pada Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 agar mencapai 100% efisien dapat merujuk pada

Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* sebesar 0,502 dan dapat merujuk pada Kabupaten Bangli dengan nilai *multiplier* sebesar 0,513.

# BAB V

# SIMPULAN DAN IMPLIKASI

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap tingkat efisiensi sektor publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2013 hingga 2015, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai variabel input yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, yaitu dalam peningkatan PDRB, peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan sebagai ukuran tingkat capaian kesejahteraan masyarakat dalam menikmati adanya pembangunan ekonomi. Pada Provinsi Bali antara lain yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar pada tahun 2013 dan tahun 2014 telah mencapai efisiensi 100% sedangkan pada Kabupaten Tabanan, Kabupten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing hanya mencapai 87,89%, 90,74%, dan 89,33% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 ketiga daerah tersebut dengan tingkat efisiensi masing-masing hanya sebesar 81,61%, 89,73%, dan 88,45%. Kemudian pada tahun 2015 berdasarkan analisis DEA telah bertambah jumlah daerah yang mengalami inefisiensi. Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem tetap mengalami inefisiensi dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami tingkat efisiensi yang semakin menurun, sedangkan

dua daerah yang bertambah mengalami inefisiensi pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng dengan masing-masing tingkat efisiensi 96,05% dan 95,83%.

2. Inefisiensi terjadi karena adanya indikasi bahwa daerah yang mengalami inefisiensi dikarenakan adanya pemborosan dalam penggunaan variabel input. Untuk mengatasi inefisiensi yang menyebabkan pemborosan penggunaan variabel input maka dalam hasil analisis DEA telah ditunjukkan cara mengatasi inefisiensi dengan mengurangi penggunaan input berdasarkan hasil anlisis DEA. Kemudian untuk daerah yang mengalami inefisiensi agar mencapai tingkat efisiensi 100% dapat mengacu pada daerah lain yang sudah mencapai efisiensi relatif 100% berdasarkan nilai *multiplier* yang telah ditunjukkan dalam analisis DEA.

**5.2 Implikasi**

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang telah mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan dapat mempertahankan demi kemajuan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan agar mampu menekan penggunaan inputnya dan mengimbangi outputnya. Jika dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masing-masing daerah tersebut, faktor lain yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, faktor-faktor sosial, birokasi, politik, dan budaya serta kondisi geografis. Namun demikian adanya

perbedaan sumber daya dan faktor-faktor lain bukanlah menjadi hambatan untuk mendapatkan output yang maksimal. Yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah pengawasan dan evaluasi penggunaan setiap input agar tidak terjadi pemborosan yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Selain itu, diperlukan juga penyusunan rencana penggunaan dana input terhadap sektor-sektor yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan agar pada masa yang akan datang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%.

# DAFTAR PUSTAKA


Chusnah, Saidatul. 2014. *Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur).* Jurnal Ilmiah FEB UB.

Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE UGM.

Kurnia, Akhmad Syakir. 2006. *Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11, No. 2.

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.* Yogyakarta: BPFE.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2003. *Ilmu Mikro Ekonomi, Edisi17*. Alih bahasa oleh Nur Rosyidah, Anna Elly, dan Bosco Carvallo. Jakarta: P.T. Media Global Edukasi.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi17*. Alih bahasa oleh Gretta, Theres Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly. Jakarta: P.T. Media Global Edukasi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, Edisi 3. Jakarta: Erlangga.

Prakoso. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Terhadap Belanja Daerah*. Skripsi S1 FEB UNDIP.

Merini D. (2012). *Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Ilmiah FEB UB.

BPS.2015. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bali 2015.* BPS Bali

BPS. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2011-2015.* BPS Bali.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Sekretaris Negara.

Muttaqin F. (2016). *Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi S1 FE UII.

## Lampiran I VARIABEL INPUT DAN VARIABEL OUTPUT (Ribu Rupiah)

| regency/city 2013 | PAD | Dana Perimbangan | Lain-lain Pendapatan yang Sah | PDRB | Penduduk Tidak Miskin | IPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jembrana | Rp 54,775,109 | Rp 511,597,033 | Rp 127,400,047 | Rp7,769,853,320,000 | 253099 | 68.39 |
| tabanan | Rp 182,799,113 | Rp 730,087,497 | Rp 197,924,187 | Rp12,967,299,394,000 | 408166 | 72.31 |
| badung | Rp 1,874,766,393 | Rp 404,924,830 | Rp 215,006,133 | Rp31,790,032,210,000 | 574511 | 77.63 |
| Gianyar | Rp 238,558,925 | Rp 638,872,430 | Rp 189,868,058 | Rp15,367,796,280 | 465248 | 74 |
| klungkung | Rp 48,541,694 | Rp 507,661,415 | Rp 57,411,879 | Rp4,899,877,699,000 | 161710 | 68.08 |
| bangli | Rp 42,000,000 | Rp 511,399,438 | Rp 99,798,044 | Rp3,779,487,800,000 | 208010 | 65.47 |
| Karangasem | Rp 140,991,228 | Rp 642,839,138 | Rp 174,465,047 | Rp9,293,057,865,000 | 376484 | 63.7 |
| Buleleng | Rp 128,000,000 | Rp 906,226,901 | Rp 252,539,384 | Rp19,144,314,878,000 | 598023 | 68.83 |
| Denpasar | Rp 513,061,591 | Rp 656,582,041 | Rp 109,116,680 | Rp29,389,253,732,000 | 828684 | 81.32 |

| regency/city 2014 | PAD | Dana Perimbangan | Lain-lain Pendapatan yang Sah | PDRB | Penduduk Tidak Miskin | IPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jembrana | Rp 65,680,235 | Rp 550,401,204 | Rp 150,223,992 | Rp 9,019,794,418,000 | 254071 | 68.67 |
| tabanan | Rp 212,931,601 | Rp 798,650,500 | Rp 249,360,434 | Rp 15,066,196,306,000 | 408992 | 72.68 |
| badung | Rp 2,197,959,213 | Rp 356,523,053 | Rp 250,262,566 | Rp 37,063,283,607,000 | 587391 | 77.98 |
| gianyar | Rp 312,160,449 | Rp 684,180,739 | Rp 191,528,894 | Rp 17,908,552,305 | 468084 | 74.29 |
| klungkung | Rp 69,749,456 | Rp 531,480,691 | Rp 66,159,107 | Rp 5,676,418,492,000 | 162546 | 68.3 |
| bangli | Rp 55,200,000 | Rp 548,602,929 | Rp 117,832,285 | Rp 4,381,649,267,000 | 208332 | 65.75 |
| karangasem | Rp 160,008,363 | Rp 701,929,283 | Rp 254,433,569 | Rp 10,785,130,056,000 | 376918 | 64.01 |
| buleleng | Rp 176,133,800 | Rp 957,813,099 | Rp 334,309,904 | Rp 22,339,136,193,000 | 598688 | 69.19 |
| denpasar | Rp 610,266,592 | Rp 715,256,133 | Rp 141,998,438 | Rp 34,209,864,524,000 | 844514 | 81.65 |

| regency/city 2015 | PAD | Dana Perimbangan | Lain-lain Pendapatan yang Sah | PDRB | Penduduk Tidak Miskin | IPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jembrana | Rp 72,832,071 | Rp 29,732,457 | Rp 193,487,333 | Rp 10,273,392,220,000 | 255738 | 69.66 |
| tabanan | Rp 243,793,958 | Rp 107,177,945 | Rp 356,973,795 | Rp 17,203,020,168,000 | 411838 | 73.54 |
| badung | Rp 2,581,898,769 | Rp 55,276,625 | Rp 319,819,244 | Rp 41,282,878,388,000 | 602038 | 78.86 |
| gianyar | Rp 370,679,368 | Rp 73,111,095 | Rp 302,667,635 | Rp 20,052,659,024 | 472276 | 75.03 |
| klungkung | Rp 89,563,450 | Rp 39,436,391 | Rp 192,070,609 | Rp 6,412,461,405,000 | 163559 | 68.98 |
| bangli | Rp 82,000,000 | Rp 44,715,580 | Rp 170,118,230 | Rp 4,990,418,202,000 | 209845 | 66.24 |
| karangasem | Rp 205,273,392 | Rp 50,855,032 | Rp 294,697,362 | Rp 12,303,827,673,000 | 378293 | 64.68 |
| buleleng | Rp 221,903,000 | Rp 99,931,800 | Rp 469,797,038 | Rp 25,491,795,174,000 | 602646 | 70.03 |
| denpasar | Rp 681,259,855 | Rp 76,600,000 | Rp 341,860,318 | Rp 38,463,727,400,000 | 859554 | 82.24 |

## Lampiran II HASIL OLAH DATA ANALISIS DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

Table of efficiencies (radial) 2013

87.89 Tabanan 89.33 Karangasem 90.74 Gianyar

100.00 Badung 100.00 Bangli 100.00 Buleleng

100.00 Denpasar 100.00 Jembrana 100.00 Klungkung

Table of peer units

Peers for Unit Tabanan efficiency 87.89% radial

| Tabanan | | Klungkung | Bangli | Buleleng | Denpasar |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 0.404 | 0.197 | 0.223 | 0.203 |
| 182799113.0 | -PAD | 19616671.8 | 8288655.8 | 28569770.8 | 104190389.2 |
| 730087497.0 | -DanaPerimb | 205156156.6 | 100924141.2 | 202271053.9 | 133335918.4 |
| 197924187.0 | -Lain-lainP | 23201291.4 | 19695039.0 | 56367127.6 | 22158956.3 |
| 12967299394000.0 | +PDRB | 1980138822800.0 | 745877942370.0 | 4273036633300.0 | 5968245995600.0 |
| 408166.0 | +PendudukTi | 65350.3 | 41050.6 | 133479.5 | 168285.7 |
| 72.3 | +IPM | 27.5 | 12.9 | 15.4 | 16.5 |

Peers for Unit Karangasem efficiency 89.33% radial

| Karangasem | | Jembrana | Bangli | Buleleng | Denpasar |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 0.348 | 0.207 | 0.221 | 0.136 |
| 140991228.0 | -PAD | 19081236.9 | 8702493.1 | 28350965.8 | 69811685.1 |
| 642839138.0 | -DanaPerimb | 178217886.7 | 105963097.3 | 200721936.3 | 89340343.3 |
| 174465047.0 | -Lain-lainP | 44380568.4 | 20678376.0 | 55935433.0 | 14847377.9 |
| 9293057865000.0 | +PDRB | 270667488140.0 | 783118250730.0 | 4240311059700.0 | 3998961066400.0 |
| 376484.0 | +PendudukTi | 88168.6 | 43100.1 | 132457.3 | 112758.1 |
| 63.7 | +IPM | 23.8 | 13.6 | 15.2 | 11.1 |

Peers for Unit Gianyar efficiency 90.74% radial

| Gianyar | | Jembrana | Buleleng | Denpasar |
|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 0.645 | 0.024 | 0.347 |

238558925.0 -PAD 35341507.5 3073846.9 178051683.4

638872430.0 -DanaPerimb 330088076.2 21762521.2 227858681.6

189868058.0 -Lain-lainP 82199922.4 6064589.0 37867595.1

15367796280.0 +PDRB 501319548270.0 459739781900.0 10199177241000.0

465248.0 +PendudukTi 163302.3 14361.2 287584.5

74.0 +IPM 44.1 1.7 28.2

Peers for Unit Badung efficiency 100.00% radial

Badung Badung

ACTUAL LAMBDA 1.000

1874766393.0 -PAD 1874766393.0

404924830.0 -DanaPerimb 404924830.0

215006133.0 -Lain-lainP 215006133.0

31790032210000.0 +PDRB 31790032210000.0

574511.0 +PendudukTi 574511.0

77.6 +IPM 77.6

Peers for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

Bangli Bangli

ACTUAL LAMBDA 1.000

42000000.0 -PAD 42000000.0

511399438.0 -DanaPerimb 511399438.0

99798044.0 -Lain-lainP 99798044.0

3779487800000.0 +PDRB 3779487800000.0

208010.0 +PendudukTi 208010.0

65.5 +IPM 65.5

Peers for Unit Buleleng efficiency 100.00% radial

Buleleng Buleleng

ACTUAL LAMBDA 1.000

128000000.0 -PAD 128000000.0

906226901.0 -DanaPerimb 906226901.0

252539384.0 -Lain-lainP 252539384.0

19144314878000.0 +PDRB 19144314878000.0

598023.0 +PendudukTi 598023.0

68.8 +IPM 68.8

Peers for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

Denpasar Denpasar

ACTUAL LAMBDA 1.000

513061591.0 -PAD 513061591.0

656582041.0 -DanaPerimb 656582041.0

109116680.0 -Lain-lainP 109116680.0

29389253732000.0 +PDRB 29389253732000.0

828684.0 +PendudukTi 828684.0

81.3 +IPM 81.3

Peers for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

Jembrana Jembrana

ACTUAL LAMBDA 1.000

54775109.0 -PAD 54775109.0

511597033.0 -DanaPerimb 511597033.0

127400047.0 -Lain-lainP 127400047.0

776985332000.0 +PDRB 776985332000.0

253099.0 +PendudukTi 253099.0

68.4 +IPM 68.4

Peers for Unit Klungkung efficiency 100.00% radial

Klungkung Klungkung

ACTUAL LAMBDA 1.000

48541694.0 -PAD 48541694.0

507661415.0 -DanaPerimb 507661415.0

57411879.0 -Lain-lainP 57411879.0

4899877699000.0 +PDRB 4899877699000.0

161710.0 +PendudukTi 161710.0

68.1 +IPM 68.1

Table of target values

Targets for Unit Tabanan efficiency 87.89% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 182799113.0 | 160665487.7 | 12.1% | 87.9% |
| -DanaPerimb | 730087497.0 | 641687270.1 | 12.1% | 87.9% |
| -Lain-lainP | 197924187.0 | 121422414.3 | 38.7% | 61.3% |
| +PDRB | 12967299394000.0 | 12967299394000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 408166.0 | 408166.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 72.3 | 72.3 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Karangasem efficiency 89.33% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 140991228.0 | 125946380.8 | 10.7% | 89.3% |
| -DanaPerimb | 642839138.0 | 574243263.6 | 10.7% | 89.3% |
| -Lain-lainP | 174465047.0 | 135841755.3 | 22.1% | 77.9% |
| +PDRB | 9293057865000.0 | 9293057865000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 376484.0 | 376484.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 63.7 | 63.7 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Gianyar efficiency 90.74% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 238558925.0 | 216467037.8 | 9.3% | 90.7% |
| -DanaPerimb | 638872430.0 | 579709279.0 | 9.3% | 90.7% |
| -Lain-lainP | 189868058.0 | 126132106.5 | 33.6% | 66.4% |
| +PDRB | 15367796280.0 | 11160236571000.0 | 72520.9% | 0.1% |
| +PendudukTi | 465248.0 | 465248.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 74.0 | 74.0 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Badung efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 1874766393.0 | 1874766393.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 404924830.0 | 404924830.0 | 0.0% | 100.0% |

-Lain-lainP 215006133.0 215006133.0 0.0% 100.0%

+PDRB 31790032210000.0 31790032210000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 574511.0 574511.0 0.0% 100.0%

+IPM 77.6 77.6 0.0% 100.0%

Targets for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 42000000.0 42000000.0 0.0% 100.0%

-DanaPerimb 511399438.0 511399438.0 0.0% 100.0%

-Lain-lainP 99798044.0 99798044.0 0.0% 100.0%

+PDRB 3779487800000.0 3779487800000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 208010.0 208010.0 0.0% 100.0%

+IPM 65.5 65.5 0.0% 100.0%

Targets for Unit Buleleng efficiency 100.00% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 128000000.0 128000000.0 0.0% 100.0%

-DanaPerimb 906226901.0 906226901.0 0.0% 100.0%

-Lain-lainP 252539384.0 252539384.0 0.0% 100.0%

+PDRB 19144314878000.0 19144314878000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 598023.0 598023.0 0.0% 100.0%

+IPM 68.8 68.8 0.0% 100.0%

Targets for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 513061591.0 513061591.0 0.0% 100.0%

-DanaPerimb 656582041.0 656582041.0 0.0% 100.0%

-Lain-lainP 109116680.0 109116680.0 0.0% 100.0%

+PDRB 29389253732000.0 29389253732000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 828684.0 828684.0 0.0% 100.0%

+IPM 81.3 81.3 0.0% 100.0%

Targets for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 54775109.0 | 54775109.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 511597033.0 | 511597033.0 | 0.0% | 100.0% |
| -Lain-lainP | 127400047.0 | 127400047.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PDRB | 776985332000.0 | 776985332000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 253099.0 | 253099.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 68.4 | 68.4 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Klungkung efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 48541694.0 | 48541694.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 507661415.0 | 507661415.0 | 0.0% | 100.0% |
| -Lain-lainP | 57411879.0 | 57411879.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PDRB | 4899877699000.0 | 4899877699000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 161710.0 | 161710.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 68.1 | 68.1 | 0.0% | 100.0% |

Table of virtual I/Os

Virtual IOs for Unit Tabanan efficiency 87.89% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 29.78% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 70.22% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 0.00% | 0.00000 |
| +PDRB | 22.79% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 24.16% | 0.00000 |
| +IPM | 40.95% | 0.00566 |

Virtual IOs for Unit Karangasem efficiency 89.33% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 26.64% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 73.36% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 0.00% | 0.00000 |

+PDRB 12.09% 0.00000

+PendudukTida 37.88% 0.00000

+IPM 39.36% 0.00618

Virtual IOs for Unit Gianyar efficiency 90.74% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 38.08% 0.00000

-DanaPerimban 61.92% 0.00000

-Lain-lainPen 0.00% 0.00000

+PDRB 0.00% 0.00000

+PendudukTida 67.17% 0.00000

+IPM 23.57% 0.00319

Virtual IOs for Unit Badung efficiency 100.00% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 22.46% 0.00000

-DanaPerimban 55.07% 0.00000

-Lain-lainPen 22.46% 0.00000

+PDRB 55.07% 0.00000

+PendudukTida 22.46% 0.00000

+IPM 22.46% 0.00289

Virtual IOs for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 56.07% 0.00000

-DanaPerimban 21.96% 0.00000

-Lain-lainPen 21.96% 0.00000

+PDRB 21.96% 0.00000

+PendudukTida 39.54% 0.00000

+IPM 38.50% 0.00588

Virtual IOs for Unit Buleleng efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 24.12% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 51.76% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 24.12% | 0.00000 |
| +PDRB | 51.76% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 24.12% | 0.00000 |
| +IPM | 24.12% | 0.00350 |

Virtual IOs for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 33.33% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 33.33% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 33.33% | 0.00000 |
| +PDRB | 33.33% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 33.33% | 0.00000 |
| +IPM | 33.33% | 0.00410 |

Virtual IOs for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 15.20% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 83.38% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 1.42% | 0.00000 |
| +PDRB | 1.42% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 38.18% | 0.00000 |
| +IPM | 60.40% | 0.00883 |

Virtual IOs for Unit Klungkung efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 33.33% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 33.33% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 33.33% | 0.00000 |
| +PDRB | 33.33% | 0.00000 |

+PendudukTida 33.33% 0.00000

+IPM 33.33% 0.00490

Table of efficiencies (radial) (2014)

81.61 Tabanan 88.45 Karangasem 89.73 Gianyar

100.00 Badung 100.00 Bangli 100.00 Buleleng

100.00 Denpasar 100.00 Jembrana 100.00 Klungkung

Table of peer units

Peers for Unit Tabanan efficiency 81.61% radial

| Tabanan | | Jembrana | Buleleng | Denpasar |
|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 0.714 | 0.147 | 0.166 |
| 212931601.0 -PAD | 46877233.6 | 25833572.8 | 101056901.9 | |
| 798650500.0 -DanaPerimb | 392831813.6 | 140482601.7 | 118442611.5 | |
| 249360434.0 -Lain-lainP | 107217721.9 | 49033287.5 | 23514186.1 | |
| 15066196306000.0 +PDRB | 6437598925000.0 | 3276484707400.0 | 5664971616800.0 | |
| 408992.0 +PendudukTi | 181335.3 | 87809.7 | 139847.0 | |
| 72.7 +IPM | 49.0 | 10.1 | 13.5 | |

Peers for Unit Karangasem efficiency 88.45% radial

| Karangasem | | Jembrana | Buleleng | Denpasar |
|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 0.560 | 0.253 | 0.099 |
| 160008363.0 -PAD | 36802044.4 | 44475002.9 | 60255118.6 | |
| 701929283.0 -DanaPerimb | 308401599.9 | 241854433.2 | 70621337.7 | |
| 254433569.0 -Lain-lainP | 84173724.8 | 84415563.3 | 14020319.7 | |
| 10785130056000.0 +PDRB | 5053984274000.0 | 5640786419400.0 | 3377736009500.0 | |
| 376918.0 +PendudukTi | 142361.4 | 151172.9 | 83383.7 | |
| 64.0 +IPM | 38.5 | 17.5 | 8.1 | |

Peers for Unit Gianyar efficiency 89.73% radial

| Gianyar | | Jembrana | Badung | Denpasar |
|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 0.653 | 0.011 | 0.350 |

312160449.0 -PAD 42900938.6 23381454.6 213811362.3

684180739.0 -DanaPerimb 359510410.4 3792621.6 250595215.5

191528894.0 -Lain-lainP 98123130.2 2662243.6 49750190.9

17908552305.0 +PDRB 5891538699000.0 394271867950.0 11985676149000.0

468084.0 +PendudukTi 165953.8 6248.5 295881.7

74.3 +IPM 44.9 0.8 28.6

Peers for Unit Badung efficiency 100.00% radial

Badung Badung

ACTUAL LAMBDA 1.000

2197959213.0 -PAD 2197959213.0

356523053.0 -DanaPerimb 356523053.0

250262566.0 -Lain-lainP 250262566.0

37063283607000.0 +PDRB 37063283607000.0

587391.0 +PendudukTi 587391.0

78.0 +IPM 78.0

Peers for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

Bangli Bangli

ACTUAL LAMBDA 1.000

55200000.0 -PAD 55200000.0

548602929.0 -DanaPerimb 548602929.0

117832285.0 -Lain-lainP 117832285.0

4381649267000.0 +PDRB 4381649267000.0

208332.0 +PendudukTi 208332.0

65.8 +IPM 65.7

Peers for Unit Buleleng efficiency 100.00% radial

Buleleng Buleleng

ACTUAL LAMBDA 1.000

176133800.0 -PAD 176133800.0

957813099.0 -DanaPerimb 957813099.0

334309904.0 -Lain-lainP 334309904.0

22339136193000.0 +PDRB 22339136193000.0

598688.0 +PendudukTi 598688.0

69.2 +IPM 69.2

Peers for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

Denpasar Denpasar

ACTUAL LAMBDA 1.000

610266592.0 -PAD 610266592.0

715256133.0 -DanaPerimb 715256133.0

141998438.0 -Lain-lainP 141998438.0

34209864524000.0 +PDRB 34209864524000.0

844514.0 +PendudukTi 844514.0

81.6 +IPM 81.6

Peers for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

Jembrana Jembrana

ACTUAL LAMBDA 1.000

65680235.0 -PAD 65680235.0

550401204.0 -DanaPerimb 550401204.0

150223992.0 -Lain-lainP 150223992.0

9019794418000.0 +PDRB 9019794418000.0

254071.0 +PendudukTi 254071.0

68.7 +IPM 68.7

Peers for Unit Klungkung efficiency 100.00% radial

Klungkung Klungkung

ACTUAL LAMBDA 1.000

69749456.0 -PAD 69749456.0

5314806691.0 -DanaPerimb 5314806691.0

66159107.0 -Lain-lainP 66159107.0

5676418492000.0 +PDRB 5676418492000.0

162546.0 +PendudukTi 162546.0

68.3 +IPM 68.3

Table of target values

Targets for Unit Tabanan efficiency 81.61% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 212931601.0 | 173767708.4 | 18.4% | 81.6% |
| -DanaPerimb | 798650500.0 | 651757026.7 | 18.4% | 81.6% |
| -Lain-lainP | 249360434.0 | 179765195.5 | 27.9% | 72.1% |
| +PDRB | 15066196306000.0 | 15379055249000.0 | 2.1% | 98.0% |
| +PendudukTi | 408992.0 | 408992.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 72.7 | 72.7 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Karangasem efficiency 88.45% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 160008363.0 | 141532165.9 | 11.5% | 88.5% |
| -DanaPerimb | 701929283.0 | 620877370.8 | 11.5% | 88.5% |
| -Lain-lainP | 254433569.0 | 182609607.8 | 28.2% | 71.8% |
| +PDRB | 10785130056000.0 | 14072506703000.0 | 30.5% | 76.6% |
| +PendudukTi | 376918.0 | 376918.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 64.0 | 64.0 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Gianyar efficiency 89.73% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 312160449.0 | 280093755.5 | 10.3% | 89.7% |
| -DanaPerimb | 684180739.0 | 613898247.6 | 10.3% | 89.7% |
| -Lain-lainP | 191528894.0 | 150535564.8 | 21.4% | 78.6% |
| +PDRB | 17908552305.0 | 18271486716000.0 | 101926.6% | 0.1% |
| +PendudukTi | 468084.0 | 468084.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 74.3 | 74.3 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Badung efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 2197959213.0 | 2197959213.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 356523053.0 | 356523053.0 | 0.0% | 100.0% |

-Lain-lainP 250262566.0 250262566.0 0.0% 100.0%

+PDRB 37063283607000.0 37063283607000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 587391.0 587391.0 0.0% 100.0%

+IPM 78.0 78.0 0.0% 100.0%

Targets for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 55200000.0 55200000.0 0.0% 100.0%

-DanaPerimb 548602929.0 548602929.0 0.0% 100.0%

-Lain-lainP 117832285.0 117832285.0 0.0% 100.0%

+PDRB 4381649267000.0 4381649267000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 208332.0 208332.0 0.0% 100.0%

+IPM 65.8 65.7 0.0% 100.0%

Targets for Unit Buleleng efficiency 100.00% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 176133800.0 176133800.0 0.0% 100.0%

-DanaPerimb 957813099.0 957813099.0 0.0% 100.0%

-Lain-lainP 334309904.0 334309904.0 0.0% 100.0%

+PDRB 22339136193000.0 22339136193000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 598688.0 598688.0 0.0% 100.0%

+IPM 69.2 69.2 0.0% 100.0%

Targets for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 610266592.0 610266592.0 0.0% 100.0%

-DanaPerimb 715256133.0 715256133.0 0.0% 100.0%

-Lain-lainP 141998438.0 141998438.0 0.0% 100.0%

+PDRB 34209864524000.0 34209864524000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 844514.0 844514.0 0.0% 100.0%

+IPM 81.6 81.6 0.0% 100.0%

Targets for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 65680235.0 | 65680235.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 550401204.0 | 550401204.0 | 0.0% | 100.0% |
| -Lain-lainP | 150223992.0 | 150223992.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PDRB | 9019794418000.0 | 9019794418000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 254071.0 | 254071.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 68.7 | 68.7 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Klungkung efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 69749456.0 | 69749456.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 5314806691.0 | 5314806691.0 | 0.0% | 100.0% |
| -Lain-lainP | 66159107.0 | 66159107.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PDRB | 5676418492000.0 | 5676418492000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 162546.0 | 162546.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 68.3 | 68.3 | 0.0% | 100.0% |

Table of virtual I/Os

Virtual IOs for Unit Tabanan efficiency 81.61% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 30.06% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 69.94% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 0.00% | 0.00000 |
| +PDRB | 0.00% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 60.67% | 0.00000 |
| +IPM | 20.94% | 0.00288 |

Virtual IOs for Unit Karangasem efficiency 88.45% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 26.88% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 73.12% | 0.00000 |

-Lain-lainPen 0.00% 0.00000

+PDRB 0.00% 0.00000

+PendudukTida 66.52% 0.00000

+IPM 21.94% 0.00343

Virtual IOs for Unit Gianyar efficiency 89.73% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 7.00% 0.00000

-DanaPerimban 93.00% 0.00000

-Lain-lainPen 0.00% 0.00000

+PDRB 0.00% 0.00000

+PendudukTida 17.43% 0.00000

+IPM 72.29% 0.00973

Virtual IOs for Unit Badung efficiency 100.00% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 28.46% 0.00000

-DanaPerimban 43.08% 0.00000

-Lain-lainPen 28.46% 0.00000

+PDRB 43.08% 0.00000

+PendudukTida 28.46% 0.00000

+IPM 28.46% 0.00365

Virtual IOs for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 14.91% 0.00000

-DanaPerimban 14.91% 0.00000

-Lain-lainPen 70.18% 0.00000

+PDRB 14.91% 0.00000

+PendudukTida 14.91% 0.00000

+IPM 70.18% 0.01067

Virtual IOs for Unit Buleleng efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 28.01% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 56.42% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 15.57% | 0.00000 |
| +PDRB | 68.86% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 15.57% | 0.00000 |
| +IPM | 15.57% | 0.00225 |

Virtual IOs for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 33.33% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 33.33% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 33.33% | 0.00000 |
| +PDRB | 33.33% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 33.33% | 0.00000 |
| +IPM | 33.33% | 0.00408 |

Virtual IOs for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 33.33% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 33.33% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 33.33% | 0.00000 |
| +PDRB | 33.33% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 33.33% | 0.00000 |
| +IPM | 33.33% | 0.00485 |

Virtual IOs for Unit Klungkung efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 29.16% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 26.53% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 44.31% | 0.00000 |

+PDRB 26.53% 0.00000

+PendudukTida 26.53% 0.00000

+IPM 46.94% 0.00687

Table of efficiencies (radial) (2015)

74.87 Tabanan 81.44 Gianyar 82.40 Karangasem

95.83 Buleleng 96.05 Klungkung 100.00 Jembrana

100.00 Badung 100.00 Bangli 100.00 Denpasar

Table of peer units

Peers for Unit Tabanan efficiency 74.87% radial

| Tabanan | | Jembrana | Denpasar |
|---|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 1.119 | 0.148 |
| 243793958.0 -PAD | | 81529095.8 | 101007645.5 |
| 107177945.0 -DanaPerimb | | 33282869.8 | 11357172.4 |
| 356973795.0 -Lain-lainP | | 216592046.6 | 50686247.8 |
| 17203020168000.0 +PDRB | | 11500158754000.0 | 5702861414100.0 |
| 411838.0 +PendudukTi | | 286276.2 | 127442.6 |
| 73.5 +IPM | | 78.0 | 12.2 |

Peers for Unit Gianyar efficiency 81.44% radial

| Gianyar | | Jembrana | Bangli | Denpasar |
|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 0.379 | 0.276 | 0.369 |
| 370679368.0 -PAD | | 27597397.5 | 22594713.7 | 251682093.3 |
| 73111095.0 –DanaPerimb | | 11266169.2 | 12321167.4 | 28298817.6 |
| 302667635.0 -Lain-lainP | | 73315872.5 | 46875276.8 | 126295597.5 |
| 20052659024.0 +PDRB | | 3892775317200.0 | 1375086223700.0 | 14209895620000.0 |
| 472276.0 +PendudukTi | | 96903.8 | 57821.8 | 317550.4 |
| 75.0 +IPM | | 26.4 | 18.3 | 30.4 |

Peers for Unit Karangasem efficiency 82.40% radial

Karangasem Jembrana Denpasar

ACTUAL LAMBDA 1.006 0.141

205273392.0 -PAD 73297825.2 95837673.1

50855032.0 -DanaPerimb 29922593.3 10775867.3

294697362.0 -Lain-lainP 194724666.2 48091924.4

12303827673000.0 +PDRB 10339089594000.0 5410966324500.0

378293.0 +PendudukTi 257373.4 120919.6

64.7 +IPM 70.1 11.6

Peers for Unit Buleleng efficiency 95.83% radial

Buleleng Jembrana Denpasar

ACTUAL LAMBDA 2.189 0.078

221903000.0 -PAD 159410767.8 53240953.1

99931800.0 -DanaPerimb 65076740.7 5986345.7

469797038.0 -Lain-lainP 423494264.2 26716632.4

25491795174000.0 +PDRB 22485826908000.0 3005968265700.0

602646.0 +PendudukTi 559745.0 67174.8

70.0 +IPM 152.5 6.4

Peers for Unit Klungkung efficiency 96.05% radial

Klungkung Jembrana Bangli

ACTUAL LAMBDA 0.502 0.513

89563450.0 -PAD 36588425.8 42070949.1

39436391.0 -DanaPerimb 14936603.9 22941791.3

192070609.0 -Lain-lainP 97201642.4 87280919.4

6412461405000.0 +PDRB 5161012771600.0 2560385732000.0

163559.0 +PendudukTi 128474.3 107663.2

69.0 +IPM 35.0 34.0

Peers for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

| | | |
|---|---|---|
| Jembrana | Jembrana | |
| ACTUAL | LAMBDA | 1.000 |
| 72832071.0 | -PAD | 72832071.0 |
| 29732457.0 | -DanaPerimb | 29732457.0 |
| 193487333.0 | -Lain-lainP | 193487333.0 |
| 10273392220000.0 | +PDRB | 10273392220000.0 |
| 255738.0 | +PendudukTi | 255738.0 |
| 69.7 | +IPM | 69.7 |

Peers for Unit Badung efficiency 100.00% radial

| | | |
|---|---|---|
| Badung | Badung | |
| ACTUAL | LAMBDA | 1.000 |
| 2581898769.0 | -PAD | 2581898769.0 |
| 55276625.0 | -DanaPerimb | 55276625.0 |
| 319819244.0 | -Lain-lainP | 319819244.0 |
| 41282878388000.0 | +PDRB | 41282878388000.0 |
| 602038.0 | +PendudukTi | 602038.0 |
| 78.9 | +IPM | 78.9 |

Peers for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

| | | |
|---|---|---|
| Bangli | Bangli | |
| ACTUAL | LAMBDA | 1.000 |
| 82000000.0 | -PAD | 82000000.0 |
| 44715580.0 | -DanaPerimb | 44715580.0 |
| 170118230.0 | -Lain-lainP | 170118230.0 |
| 4990418202000.0 | +PDRB | 4990418202000.0 |
| 209845.0 | +PendudukTi | 209845.0 |
| 66.2 | +IPM | 66.2 |

Peers for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

| Denpasar | | Denpasar |
|---|---|---|
| ACTUAL | LAMBDA | 1.000 |
| 681259855.0 | -PAD | 681259855.0 |
| 76600000.0 | -DanaPerimb | 76600000.0 |
| 341860318.0 | -Lain-lainP | 341860318.0 |
| 38463727400000.0 | +PDRB | 38463727400000.0 |
| 859554.0 | +PendudukTi | 859554.0 |
| 82.2 | +IPM | 82.2 |

Table of target values

Targets for Unit Tabanan efficiency 74.87% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 243793958.0 | 182536741.3 | 25.1% | 74.9% |
| -DanaPerimb | 107177945.0 | 44640042.2 | 58.3% | 41.7% |
| -Lain-lainP | 356973795.0 | 267278294.3 | 25.1% | 74.9% |
| +PDRB | 17203020168000.0 | 17203020168000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 411838.0 | 413718.8 | 0.5% | 99.5% |
| +IPM | 73.5 | 90.2 | 22.6% | 81.6% |

Targets for Unit Gianyar efficiency 81.44% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 370679368.0 | 301874204.5 | 18.6% | 81.4% |
| -DanaPerimb | 73111095.0 | 51886154.1 | 29.0% | 71.0% |
| -Lain-lainP | 302667635.0 | 246486746.8 | 18.6% | 81.4% |
| +PDRB | 20052659024.0 | 19477757161000.0 | 97033.0% | 0.1% |
| +PendudukTi | 472276.0 | 472276.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 75.0 | 75.0 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Karangasem efficiency 82.40% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 205273392.0 | 169135498.3 | 17.6% | 82.4% |

-DanaPerimb 50855032.0 40698460.5 20.0% 80.0%

-Lain-lainP 294697362.0 242816590.6 17.6% 82.4%

+PDRB 12303827673000.0 15750055918000.0 28.0% 78.1%

+PendudukTi 378293.0 378293.0 0.0% 100.0%

+IPM 64.7 81.7 26.3% 79.2%

Targets for Unit Buleleng efficiency 95.83% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 221903000.0 212651720.9 4.2% 95.8%

-DanaPerimb 99931800.0 71063086.4 28.9% 71.1%

-Lain-lainP 469797038.0 450210896.6 4.2% 95.8%

+PDRB 25491795174000.0 25491795174000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 602646.0 626919.8 4.0% 96.1%

+IPM 70.0 158.9 126.9% 44.1%

Targets for Unit Klungkung efficiency 96.05% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 89563450.0 78659374.8 12.2% 87.8%

-DanaPerimb 39436391.0 37878395.2 4.0% 96.0%

-Lain-lainP 192070609.0 184482561.8 4.0% 96.0%

+PDRB 6412461405000.0 7721398503600.0 20.4% 83.0%

+PendudukTi 163559.0 236137.5 44.4% 69.3%

+IPM 69.0 69.0 0.0% 100.0%

Targets for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED

-PAD 72832071.0 72832071.0 0.0% 100.0%

-DanaPerimb 29732457.0 29732457.0 0.0% 100.0%

-Lain-lainP 193487333.0 193487333.0 0.0% 100.0%

+PDRB 10273392220000.0 10273392220000.0 0.0% 100.0%

+PendudukTi 255738.0 255738.0 0.0% 100.0%

+IPM 69.7 69.7 0.0% 100.0%

Targets for Unit Badung efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 2581898769.0 | 2581898769.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 55276625.0 | 55276625.0 | 0.0% | 100.0% |
| -Lain-lainP | 319819244.0 | 319819244.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PDRB | 41282878388000.0 | 41282878388000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 602038.0 | 602038.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 78.9 | 78.9 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 82000000.0 | 82000000.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 44715580.0 | 44715580.0 | 0.0% | 100.0% |
| -Lain-lainP | 170118230.0 | 170118230.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PDRB | 4990418202000.0 | 4990418202000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 209845.0 | 209845.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 66.2 | 66.2 | 0.0% | 100.0% |

Targets for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | ACTUAL | TARGET | TO GAIN | ACHIEVED |
|---|---|---|---|---|
| -PAD | 681259855.0 | 681259855.0 | 0.0% | 100.0% |
| -DanaPerimb | 76600000.0 | 76600000.0 | 0.0% | 100.0% |
| -Lain-lainP | 341860318.0 | 341860318.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PDRB | 38463727400000.0 | 38463727400000.0 | 0.0% | 100.0% |
| +PendudukTi | 859554.0 | 859554.0 | 0.0% | 100.0% |
| +IPM | 82.2 | 82.2 | 0.0% | 100.0% |

Table of virtual I/Os

Virtual IOs for Unit Tabanan efficiency 74.87% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 39.00% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 0.00% | 0.00000 |

-Lain-lainPen 61.00% 0.00000

+PDRB 74.87% 0.00000

+PendudukTida 0.00% 0.00000

+IPM 0.00% 0.00000

Virtual IOs for Unit Gianyar efficiency 81.44% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 15.23% 0.00000

-DanaPerimban 0.00% 0.00000

-Lain-lainPen 84.77% 0.00000

+PDRB 0.00% 0.00000

+PendudukTida 47.62% 0.00000

+IPM 33.82% 0.00451

Virtual IOs for Unit Karangasem efficiency 82.40% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 32.99% 0.00000

-DanaPerimban 0.00% 0.00000

-Lain-lainPen 67.01% 0.00000

+PDRB 0.00% 0.00000

+PendudukTida 82.40% 0.00000

+IPM 0.00% 0.00000

Virtual IOs for Unit Buleleng efficiency 95.83% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 30.66% 0.00000

-DanaPerimban 0.00% 0.00000

-Lain-lainPen 69.34% 0.00000

+PDRB 95.83% 0.00000

+PendudukTida 0.00% 0.00000

+IPM 0.00% 0.00000

Virtual IOs for Unit Klungkung efficiency 96.05% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 0.00% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 14.76% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 85.24% | 0.00000 |
| +PDRB | 0.00% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 0.00% | 0.00000 |
| +IPM | 96.05% | 0.01392 |

Virtual IOs for Unit Jembrana efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 33.33% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 33.33% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 33.33% | 0.00000 |
| +PDRB | 33.33% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 33.33% | 0.00000 |
| +IPM | 33.33% | 0.00479 |

Virtual IOs for Unit Badung efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 22.19% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 55.61% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 22.19% | 0.00000 |
| +PDRB | 55.61% | 0.00000 |
| +PendudukTida | 22.19% | 0.00000 |
| +IPM | 22.19% | 0.00281 |

Virtual IOs for Unit Bangli efficiency 100.00% radial

| VARIABLE | VIRTUAL IOs | IO WEIGHTS |
|---|---|---|
| -PAD | 4.52% | 0.00000 |
| -DanaPerimban | 4.52% | 0.00000 |
| -Lain-lainPen | 90.95% | 0.00000 |

+PDRB 4.52% 0.00000

+PendudukTida 4.52% 0.00000

+IPM 90.95% 0.01373

Virtual IOs for Unit Denpasar efficiency 100.00% radial

VARIABLE VIRTUAL IOs IO WEIGHTS

-PAD 23.96% 0.00000

-DanaPerimban 23.96% 0.00000

-Lain-lainPen 52.07% 0.00000

+PDRB 52.07% 0.00000

+PendudukTida 23.96% 0.00000

+IPM 23.96% 0.0029

## Lampiran III EVALUASI PENGGUNAAN VARIABEL INPUT

| Tahun 2013 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten/kota | Input | | | Tingkat Efisien | Penggunaan Input yang Efisien | | | Mengurangi | Pemborosan | | |
| | PAD | DP | LPS | | PAD | DP | LPS | Setiap Input | PAD | DP | LPS |
| jembrana | 54775109 | 511597033 | 127,400,047 | 100% | | | | | | | |
| tabanan | 182799113 | 730087497 | 197,924,187 | 87.89% | 160662140.4 | 641673901.1 | 173955568 | 12.11% | 22136972.58 | 88413595.9 | 23968619.05 |
| badung | 1874766393 | 404924830 | 215,006,133 | 100% | | | | | | | |
| gianyar | 238558925 | 638872430 | 189,868,058 | 90.74% | 216468368.5 | 579712843 | 172286275.8 | 9.26% | 22090556.46 | 59159587 | 17581782.17 |
| klungkung | 48541694 | 507661415 | 57,411,879 | 100% | | | | | | | |
| bangli | 42000000 | 511399438 | 99,798,044 | 100% | | | | | | | |
| karangasem | 140991228 | 642839138 | 174,465,047 | 89.33% | 125947464 | 574248202 | 155849626.5 | 10.67% | 15043764.03 | 68590936 | 18615420.51 |
| buleleng | 128000000 | 906226901 | 252,539,384 | 100% | | | | | | | |
| denpasar | 513061591 | 656582041 | 109,116,680 | 100% | | | | | | | |

| Tahun 2014 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten/kota | Input | | | Tingkat Efisien | Penggunaan Input yang Efisien | | | Mengurangi | Pemborosan | | |
| | PAD | DP | LPS | | PAD | DP | LPS | Setiap Input | PAD | DP | LPS |
| jembrana | 65680235 | 550401204 | 150,223,992 | 100% | | | | | | | |
| tabanan | 212931601 | 798650500 | 249,360,434 | 81.61% | 173773479.6 | 651778673.1 | 203503050.2 | 18.39% | 39158121.42 | 146871827 | 45857383.81 |
| badung | 2197959213 | 356523053 | 250,262,566 | 100% | | | | | | | |
| gianyar | 312160449 | 684180739 | 191,528,894 | 89.73% | 280101570.9 | 613915377.1 | 171858876.6 | 10.27% | 32058878.11 | 70265361.9 | 19670017.41 |
| klungkung | 69749456 | 531480691 | 66,159,107 | 100% | | | | | | | |
| bangli | 55200000 | 548602929 | 117,832,285 | 100% | | | | | | | |
| karangasem | 160008363 | 701929283 | 254,433,569 | 88.45% | 141527397.1 | 620856450.8 | 225046491.8 | 11.55% | 18480965.93 | 81072832.2 | 29387077.22 |
| buleleng | 176133800 | 957813099 | 334,309,904 | 100% | | | | | | | |
| denpasar | 610266592 | 715256133 | 141,998,438 | 100% | | | | | | | |

| Tahun 2015 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten/kota | Input | | | Tingkat Efisien | Penggunaan Input yang Efisien | | | Mengurangi | Pemborosan | | |
| | PAD | DP | LPS | | PAD | DP | LPS | Setiap Input | PAD | DP | LPS |
| jembrana | 72832071 | 29732457 | 193,487,333 | 100% | | | | | | | |
| tabanan | 243793958 | 107177945 | 356,973,795 | 74.87% | 182528536.4 | 80244127.42 | 267266280.3 | 25.13% | 61265421.65 | 26933817.58 | 89707514.68 |
| badung | 2581898769 | 55276625 | 319,819,244 | 100% | | | | | | | |
| gianyar | 370679368 | 73111095 | 302,667,635 | 81.44% | 301881277.3 | 59541675.77 | 246492521.9 | 18.56% | 68798090.7 | 13569419.23 | 56175113.06 |
| klungkung | 89563450 | 39436391 | 192,070,609 | 96.05% | 86025693.73 | 37878653.56 | 184483819.9 | 3.95% | 3537756.275 | 1557737.445 | 7586789.056 |
| bangli | 82000000 | 44715580 | 170,118,230 | 100% | | | | | | | |
| karangasem | 205273392 | 50855032 | 294,697,362 | 82.40% | 169145275 | 41904546.37 | 242830626.3 | 17.60% | 36128116.99 | 8950485.632 | 51866735.71 |
| buleleng | 221903000 | 99931800 | 469,797,038 | 95.83% | 212649644.9 | 95764643.94 | 450206501.5 | 4.17% | 9253355.1 | 4167156.06 | 19590536.48 |
| denpasar | 681259855 | 76600000 | 341,860,318 | 100% | | | | | | | |

Keterangan : - PAD : pendapatan asli daerah

-DP : dana perimbangan

-LPS : lain-lain pendapatan yang sah

-